



**ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

Adellia Pratiwi

160810101112

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2021



**ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Adellia Pratiwi

NIM 160810101112

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2021

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Ghozali dan Ibu Bidah Sukarti, orang tua tercinta yang senantiasa tulus memberikan doa, dorongan serta dukungan dalam perjalanan saya selama ini, selalu memberikan kasih sayang dan cinta yang tak terhingga sehingga saya selalu diberkahi rasa semangat untuk terus mewujudkan cita-cita;
2. Ridwan Santoso, adik tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat;
3. Bapak dan Ibu guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah memberikan pondasi keilmuan dan moral selama ini;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Jangan selalu melihat ke belakang karena disana ada masa lalu yang menghantuimu. Jangan selalu melihat ke depan karena terkadang ada masa depan yang membuatmu gelisah. Namun lihatlah ke atas karena disana ada Allah SWT yang membuatmu bahagia”

-Prof. M. Quraish Shihab, M.A

”Sebelum Anda menasehati orang banyak, sudahkah Anda menasehati diri Anda sendiri?”

-KH. Mustofa Bisri

“Setiap orang memang punya waktunya sendiri, tapi hidup juga punya *timer*-nya sendiri ”

-Teguh Andi R

*“Sometimes it’s okay not to be ‘fighting’ all the time and you can be worn out.
You can be tired, but be happy”*

-Koo Junhoe

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adellia Pratiwi

NIM : 160810101112

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Januari 2021

Yang Menyatakan,

Adellia Pratiwi
NIM. 160810101112

SKRIPSI

**ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Oleh :

Adellia Pratiwi

NIM. 160810101112

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E.

Dosen Pembimbing II : Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M.Si.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur

Nama Mahasiswa : Adellia Pratiwi

NIM : 160810101112

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan : 23 Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E.

NIP. 197806162003122001

Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M.Si.

NIP. 197409132001122001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P., CPHCM.

NIP. 197207131999031001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Adellia Pratiwi

NIM : 160810101112

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal :

22 Januari 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Rafael Purতোmo Somaji, M.Si. (.....)
NIP. 195810241988031001
2. Sekretaris : Dr. Moh. Adenan, M.M. (.....)
NIP. 196610311992031001
3. Anggota : Aisah Jumiaty, S.E., M.P. (.....)
NIP. 196809261994032002

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.
NIP. 19661020 199002 2 001

**Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur**

Adellia Pratiwi

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi otonomi. Pelaksanaan otonomi yang didukung desentralisasi fiskal memiliki tujuan agar daerah otonom mandiri dalam hal pengelolaan keuangan daerah termasuk meningkatkan PAD untuk membiayai kegiatan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisa derajat desentralisasi fiskal serta melihat pengaruh dari derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya pada kabupaten/kota di Koridor Utara Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis derajat desentralisasi fiskal dan analisis regresi data panel dengan model *fix effect*. Hasil analisis derajat desentralisasi fiskal menunjukkan Provinsi Jawa Timur, khususnya kabupaten/kota yang berada di Koridor Utara Selatan rata-rata masih berada pada kategori kurang dengan rata-rata DDF kurang dari 20%. Sedangkan, hasil analisis regresi data panel menunjukkan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta TPAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Derajat Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Koridor Utara Selatan

An Analysis the Degree of Fiscal Decentralization and the Impact on the Economic Growth in East Java Province

Adellia Pratiwi

*Development Economics Departemen, Faculty of Economics and Business,
University of Jember*

ABSTRACT

Indonesia has a change in the government system from centralization to autonomy. The implementation of autonomy supported by fiscal decentralization has the objective of making the autonomous region independent in managing the regional finance, including increasing the Locally-Generated Revenue (PAD) to finance regional activities. This study aims to analyze the degree of fiscal decentralization and find out the impact of fiscal decentralization on the economic growth in East Java Province, especially in districts/cities in the North-South Corridor. This study used the analysis in the degree of fiscal decentralization and the panel data regression analysis with fix effect model. The results of the analysis in the degree of fiscal decentralization show that East Java Province, especially districts/cities in the North-South Corridor, is still in the lack category with an average of DDF less than 20%. Meanwhile, the result of panel data regression analysis shows that the degree of fiscal decentralization has a positive and significant impact on economic growth, capital expenditure has a negative but not significant impact on the economic growth, and TPAK (Labour Force Participation Rates) has a positive and significant impact on the economic growth.

Keywords: Degree of Fiscal Decentralization, Economic Growth, North-South Corridor

RINGKASAN

Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur; Adellia Pratiwi; 160810101112; 2021; 121 Halaman; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Sebelum memasuki masa reformasi, Indonesia menganut sistem pemerintahan sentralisasi yaitu pemerintah pusat sebagai pembuat maupun penetap segala bentuk keputusan, kebijakan, dan kewenangan, sehingga pemerintah daerah hanya menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun, pada pelaksanaannya terdapat permasalahan pembangunan. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana setiap daerah memiliki karakteristik maupun potensi yang beragam, sehingga pola pembangunan ekonomi dan hasil yang didapatkan tidak seragam. Maka terjadilah perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Daerah otonomi memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur daerahnya serta dalam hal penyediaan pelayanan publik. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki tujuan agar daerah otonom mampu atau mandiri dalam melakukan pembiayaan terkait dengan kegiatan pemerintahan daerah dengan memanfaatkan potensi daerahnya, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Pada pembangunan daerah, keuangan daerah memiliki peranan yang penting, dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana PAD digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan pertumbuhan ekonomi termasuk baik, begitupula dengan kabupaten/kota yang berada di wilayah Jawa Timur. Koridor Utara Selatan merupakan salah satu dari 4 koridor pembangunan Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun beberapa daerah pada koridor ini menjadi penerima dana perimbangan terbesar.

Penelitian ini bertujuan mengetahui derajat desentralisasi fiskal pada Provinsi Jawa Timur, terutama pada Koridor Utara Selatan dengan menggunakan analisis derajat desentralisasi fiskal. Analisis derajat desentralisasi fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD yang digunakan untuk membiayai kegiatan daerah. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk mengetahui besarnya campur tangan pemerintah pusat dan kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Selain itu tujuan dalam penelitian ini juga mengetahui pengaruh dari derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Koridor Utara Selatan dengan menggunakan metode analisis regresi data panel.

Hasil dari analisis derajat desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten/kota yang berada di Koridor Utara Selatan selama periode 2014-2018 masih berada pada kategori kurang dengan rata-rata persentase kurang dari 20,00% setiap tahunnya. Namun, ada beberapa daerah yang masuk pada kategori sedang, cukup, baik, hingga sangat baik dengan persentase lebih dari 20,01%, 30,01%, 40,01% hingga lebih dari 50,00%. Sedangkan hasil dari analisis regresi data panel adalah, *fixed effect model* merupakan model terbaik pada penelitian. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal memiliki t-statistik sebesar 6,355009 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Sehingga, derajat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Koridor utara Selatan pada tingkat alfa 5%. Berbeda dengan derajat desentralisasi fiskal, nilai t-statistik pada belanja modal menunjukkan angka negatif yaitu -0,277085 dengan probabilitas 0,1831. Hal ini menunjukkan belanja modal memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat alfa 5%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki nilai t-statistik sebesar 3,180398 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0027, sehingga TPAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas segala petunjuk kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.” Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, kesempatan, dan nasihat kepada saya untuk terus belajar, serta membimbing dan membantu saya hingga skripsi ini selesai;
2. Ibu Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga telah memberikan banyak ilmu, arahan, saran, kritik, serta membantu saya hingga skripsi ini selesai;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Jember;
5. Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P., CPHCM, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan banyak nasihat, saran, dan ilmu kepada saya selama perjalanan menyelesaikan studi;
7. Bapak dan Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan kritik yang membangun saya dalam memperbaiki skripsi saya;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
9. Orang tua tercinta dan terkasih, Bapak Ghozali dan Ibu Bidah Sukarti serta adik saya Ridwan Santoso yang senantiasa berada disisi saya untuk

memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah saya, memberikan kasih sayang, serta semangat sehingga saya bisa berada dititik ini dan terus bertekad mewujudkan cita-cita;

10. Ayu Almira, sahabat yang selalu mendukung, mendorong, dan membantu saya dalam segala keadaan hingga sekarang skripsi ini bisa terselesaikan;
11. Dina Rizkia, Sofia Janahtul Isnaini, Kiky Indah Sari dan Rizki Amin, sahabat yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, pengalaman dan memori yang mengesankan;
12. Keluarga konsentrasi Ekonomi Regional dan seluruh teman angkatan 2016 yang memberikan warna dikehidupan saya sebagai mahasiswa Ilmu Ekonomi;
13. Keluarga KKN 42 Kec. Maesan, Kab. Bondowoso, 2019 yang memberikan banyak pengalaman menyenangkan;
14. Rekan-rekan HMJ-IE periode 2017 dan 2018 yang memberikan banyak pengalaman dalam keorganisasian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa belajar banyak hal;
15. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kepada penulis sangat diharapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan.

Jember, 22 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah	14

2.1.3	Teori Pembagian Kekuasaan.....	18
2.1.4	Otonomi Daerah.....	19
2.1.5	Desentralisasi Fiskal	20
2.1.6	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF).....	21
2.1.7	Sumber Pendapatan Keuangan Daerah	22
2.1.8	Belanja Modal	25
2.1.9	Tenaga Kerja	26
2.1.10	Hubungan Derajat Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	27
2.1.11	Hubungan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	28
2.1.12	Hubungan Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi	29
2.2	Penelitian Terdahulu	30
2.3	Kerangka Konsep.....	37
2.4	Hipotesis Penelitian.....	39
2.5	Asumsi Penelitian.....	39
BAB 3.	METODE PENELITIAN.....	40
3.1	Jenis penelitian	40
3.1.1	Waktu dan Tempat Penelitian	40
3.1.2	Jenis dan Sumber Data	40
3.2	Desain Penelitian	41
3.3	Metode Analisis Data	42
3.3.1	Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal.....	42
3.3.2	Analisis Regresi Data Panel	42
3.4	Metode Analisis Regresi Data Panel	43
3.4.1	Analisis Regresi Data Panel	44
3.4.2	Uji Statistik	47
3.4.3	Uji Asumsi Klasik.....	49
3.5	Definisi Operasional.....	51
3.5.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	51

3.5.2	Derajat Desentralisasi Fiskal.....	51
3.5.3	Belanja Modal	52
3.5.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	52
3.6	Limitasi Penelitian	52
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1	Gambaran Umum	53
4.1.1	Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur.....	53
4.2	Definisi Variabel Penelitian	61
4.2.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	61
4.2.2	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF).....	62
4.2.3	Belanja Modal	64
4.2.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66
4.3	Hasil Penelitian.....	67
4.3.1	Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF).....	67
4.3.2	Analisis Regresi Data Panel	70
4.4	Pembahasan.....	78
4.4.1	Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF).....	78
4.4.2	Analisis Regresi Data Panel.....	80
a.	Hasil Estimasi <i>Individual Effect</i> pada Model <i>Fixed Effect</i>	80
b.	Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	82
c.	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	84
d.	Pengaruh TPAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	85
BAB 5.	PENUTUP.....	88
5.1	Kesimpulan.....	88
5.2	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	22
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2018.....	61
Tabel 4.2 Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2018.....	63
Tabel 4.3 Realisasi Belanja Modal Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2018	65
Tabel 4.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2018.....	67
Tabel 4.5 Hasil Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) pada Kabupaten/Kota Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018	68
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Uji Chow	71
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Uji Hausman	71
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Data Panel dengan Metode <i>Fixed Effect</i>	72
Tabel 4.9 Hasil Estimasi <i>Individual Effect</i> pada Model <i>Fixed Effect</i>	75
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	76
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Realisasi Dana Perimbangan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018.....	4
Gambar 1.2 Realisasi Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018.....	5
Gambar 1.3 Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018	6
Gambar 1.4 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.....	7
Gambar 2.1 Kerangka Konsep	38
Gambar 3.1 Desain Metode Penulisan	41
Gambar 4.1 Hasil Uji Autokorelasi.....	77
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Penelitian.....	97
Lampiran B Pengujian Analisis Regresi Data Panel.....	98
Lampiran B1 Uji Chow	98
Lampiran B2 Uji Hausman	98
Lampiran C Model Terbaik.....	99
Lampiran D Hasil Estimasi <i>Individual Effect</i> pada Model <i>Fixed Effect</i>	99
Lampiran E Uji Asumsi Klasik	100
Lampiran E1 Uji Heteroskedastisitas	100
Lampiran E2 Uji Autokorelasi	100
Lampiran E3 Uji Normalitas	101
Lampiran E4 Uji Multikolinearitas	101

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peralihan sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi diawali dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR RI tersebut ditetapkan pada tanggal 13 November 1998, dimana berisi tentang asas-asas penyelenggaraan otonomi daerah. Sebelum memasuki masa reformasi, Indonesia menganut sistem pemerintahan sentralisasi yaitu pemerintah pusat sebagai pembuat maupun penetap segala bentuk keputusan, kebijakan, dan kewenangan, sehingga pemerintah daerah hanya menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah NKRI. Pelaksanaan sistem sentralisasi ternyata tidak selalu memberikan dampak yang positif bagi proses pembangunan di Indonesia. Terdapat permasalahan pembangunan yang menjadi ancaman bagi pemerintah yaitu terjadi disintegrasi, ketimpangan pembangunan, kemiskinan, kualitas hidup masyarakat rendah, serta permasalahan pada pembangunan sumber daya (Febriantoko, 2017).

Indonesia yang merupakan negara kepulauan, dimana setiap daerah mempunyai karakteristik maupun potensi yang beragam, sehingga pola pembangunan ekonomi dan hasil yang didapatkan dari pembangunan tidak seragam. Itulah sebabnya sistem sentralisasi dirasa tidak cocok dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan (Sianturi dan Miyastro, 2011). Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai bentuk keseriusan dalam mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut diberlakukan mulai 1 Januari 2001, sehingga sejak saat itu, sistem pemerintahan Indonesia telah beralih menjadi

desentralisasi. Namun, UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 telah mengalami amandemen menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Otonomi dan desentralisasi memiliki pengertian yang berbeda. Pada otonomi terdapat kebebasan melaksanakan sesuatu oleh unit politik atau bagian wilayah yang berkaitan dengan masyarakat politik atau negara, sedangkan desentralisasi memiliki pengertian yaitu terjadi peralihan wewenang atau kekuasaan dari pemerintah yang kedudukannya lebih tinggi kepada pemerintah yang berada dibawahnya. Dengan kata lain, desentralisasi berarti terjadi pengurangan atau penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat ke daerah-daerah (Saragih, 2003).

Pemahaman tentang desentralisasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan sebuah kebijakan dimana pemerintah daerah wewenang untuk mengatur keuangannya. Desentralisasi fiskal digunakan sebagai pendukung dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dimana adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menggali potensi daerahnya, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan serta melakukan peran alokasi secara mandiri terkait pembangunan yang diprioritaskan (Suwandi, 2015). Dalam melaksanakan pembangunan daerah, keuangan daerah memiliki peranan yang penting. Keuangan daerah dapat dilihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana susunan APBD terdiri dari sisi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah (DJPK, 2018). Salah satu komponen yang ada di APBD pada sisi pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah atau PAD, dimana PAD digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Jika PAD semakin besar, maka ketergantungan daerah terhadap sumber-sumber penerimaan lain seperti dana perimbangan akan semakin kecil (Reksohadiprodo, 2000). Sedangkan sisi belanja daerah yang merupakan bentuk pelayanan publik dari pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, modal, barang dan jasa, serta belanja lainnya (DJPK, 2018).

Pelaksanaan otonomi daerah tentunya memiliki tujuan agar daerah otonom mampu atau mandiri dalam melakukan pembiayaan terkait dengan kegiatan

pemerintahan daerah, serta ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Hal ini didukung oleh penjelasan dari Reksohadiprojo (2000), bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah bisa dipelajari dengan melihat besarnya desentralisasi fiskal suatu daerah, dimana pengukuran kemandirian fiskal daerah menggunakan derajat otonomi fiskal atau derajat desentralisasi fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) menunjukkan seberapa besar campur tangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian dari Syukri (2019) dimana Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat, dikarenakan Provinsi Sulawesi Selatan mulai bisa membiayai kebutuhan daerahnya dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki. Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Sistiana dan Makmur (2014) menunjukkan hasil, bahwa keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemberian dana dari pemerintah. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian dari Syahputra (2017) bahwa di derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Aceh Tamiang relatif rendah, dikarenakan dalam membiayai kegiatan daerah, pemerintah daerah masih bergantung dari bantuan pemerintah pusat.

Hasil dari dua penelitian yang menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat bertentangan dengan penjelasan bahwa otonomi daerah diharapkan dapat menemukan alternatif sumber pembiayaan pembangunan lainnya selain bantuan dari pemerintah pusat. Sumber pembiayaan lainnya misalkan dari investasi swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan bisa memacu pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah termasuk mengembangkan sumber daya alam maupun potensi lainnya agar menjadi sumber pendapatan daerah (Christia dan Ispiarso, 2019).

Terkait hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah, Oates (1993) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik serta anggaran belanja. Namun, desentralisasi fiskal tidak hanya memberikan pengaruh secara

positif, tapi juga pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan melalui penelitian Saputra dan Mahmudi (2012) dengan menggunakan analisis jalur, ditemukan hasil bahwa desentralisasi fiskal menunjukkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dikarenakan pemerintah daerah lemah dalam hal pengelolaan anggaran. Sedangkan penelitian dari Al-Aksari (2017) menunjukkan hasil yang sebaliknya, bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dikarenakan pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan sejalan dengan meningkatnya sumber-sumber pendanaan daerah, karena desentralisasi fiskal.

Provinsi Jawa Timur sebagai pusat perekonomian di Pulau Jawa bagian timur dengan pertumbuhan ekonomi yang baik namun hal ini tidak dapat dijadikan acuan bahwa, Provinsi Jawa Timur telah menjadi provinsi yang mandiri atau mampu mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri melalui potensi yang dimiliki (Sistiana dan Makmur, 2014). Hal ini dapat dilihat dari data realisasi pendapatan pemerintah provinsi dari dana perimbangan masing-masing provinsi di Pulau Jawa.



Gambar 1.1 Realisasi Dana Perimbangan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018 (Juta Rupiah)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (data diolah)

Gambar 1.1 menjelaskan mengenai dana perimbangan yang diterima setiap provinsi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur berada di urutan ke-3 sebagai provinsi dengan penerima dana perimbangan terbanyak yaitu sebesar Rp 13.295.784.850. Sedangkan provinsi yang menerima dana perimbangan paling sedikit adalah Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta, yaitu sebesar Rp 2.317.436.811. Dana perimbangan pada Provinsi Jawa Timur tahun 2018 didominasi oleh Dana Alokasi

Khusus yang mencapai 50% lebih dari total dana perimbangan yaitu sebesar Rp 6. 858. 141. 681. Pendapatan pada Provinsi Jawa Timur dapat diperjelas melalui grafik trend pendapatan Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014 hingga 2018.



Gambar 1.2 Realisasi Dana Perimbangan dan PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (data diolah)

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun dana perimbangan yang diterima oleh Provinsi Jawa Timur semakin meningkat. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Pada 2016, dana perimbangan yang diterima sebesar Rp 9.039.003.359 lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu Rp 3.115.619.118. Begitupula pada tahun 2017, dana perimbangan yang diterima oleh Provinsi Jawa Timur meningkat dari Rp 9.039.003.359 menjadi Rp 12.494.048.645. Peningkatan dana perimbangan ini masih terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar Rp 13.295.784.450. Peningkatan penerimaan dana perimbangan tersebut diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Peningkatan PAD secara signifikan terjadi setiap tahunnya, misalkan pada 2018, PAD Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 18.531.062.021 dimana jumlah ini lebih besar daripada tahun sebelumnya yaitu Rp 17.324.177.665.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, dimana Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dan terbagi lagi menjadi 4 koridor pembangunan yaitu Koridor Utara Selatan, Barat Daya, Timur, dan Utara. Dimana setiap kabupaten/kota yang berada pada koridor tersebut memiliki kemampuan keuangan

dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi dikarenakan kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, misalnya tenaga kerja ahli, tersedianya sarana prasarana yang dapat mendukung pembangunan dan memengaruhi peranan investor dalam memilih daerah tersebut, serta retribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada daerah (Arifin, 2009). Koridor Utara Selatan terdiri atas 6 kabupaten dan 6 kota, antara lain Kabupaten Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, Malang, dan Blitar serta Kota Surabaya, Batu, Pasuruan, Mojokerto, Malang, dan Blitar. Koridor Utara Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika dibandingkan dengan koridor lainnya (Andiatma, 2014). Hal ini dapat dilihat melalui grafik laju PDRB atas dasar harga konstan 2010 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2018.

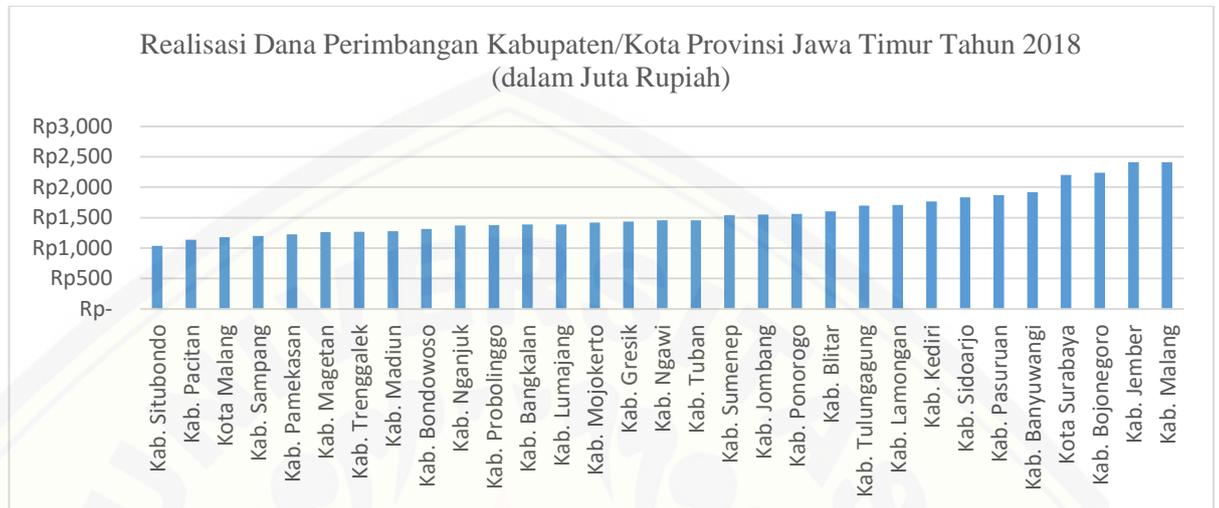


Gambar 1.3. Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (data diolah).

Gambar 1.3 menjelaskan mengenai laju PDRB dari setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten/Kota yang masuk dalam Koridor Utara Selatan memiliki angka laju PDRB diatas Provinsi Jawa Timur, yaitu 5.50%. Kabupaten/Kota tersebut antara lain; Kota Batu (6.50%), Kota Surabaya (6.20%), Kabupaten Sidoarjo (6.05%), dan Kabupaten Gresik (5.97%). Kabupaten Blitar satu-satunya dari Koridor Utara Selatan yang laju PDRB dibawah Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 5.10%. Meskipun kabupaten/kota memiliki laju PDRB tinggi,

tidak membuat kabupaten/kota pada koridor tersebut mandiri secara fiskal. Hal ini dibuktikan melalui grafik realisasi dana perimbangan kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2018.



Gambar 1.4. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 (Juta Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (data diolah)

Gambar 1.4 menjelaskan bahwa beberapa kabupaten/kota yang berada di Koridor Utara Selatan menjadi daerah yang menerima dana perimbangan dengan jumlah yang tinggi. Kabupaten/kota tersebut antara lain; Kabupaten Malang sebagai penerima dana perimbangan tertinggi di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar Rp 2.411.639.617. Selanjutnya ada Kota Surabaya berada diposisi ke-4 dengan jumlah dana perimbangan sebesar Rp 2.200.611.082. Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 1.870.262.219 dan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 1.833.192.381. Kabupaten/kota yang berada di Koridor Utara Selatan dengan dana perimbangan paling sedikit adalah Kota Mojokerto yaitu sebesar Rp 549.700.250.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, meskipun setiap kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Timur memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, belum tentu segala potensi yang dimiliki daerah tersebut berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi daerahnya, sehingga peneliti mengambil judul “Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur” untuk mengetahui bagaimana tingkat

kemandirian fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Koridor Utara Selatan Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana derajat desentralisasi fiskal Provinsi Jawa Timur, khususnya di Koridor Utara Selatan?
2. Bagaimana derajat desentralisasi fiskal dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, khususnya di Koridor Utara Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Mengetahui derajat desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Koridor Utara Selatan.
2. Mengetahui pengaruh dari derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, khususnya di Koridor Utara Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi maupun peneliti berikutnya untuk:

1. Menjadi bahan kajian dan verifikasi empiris terkait derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Menjadi bahan referensi dalam bidang ilmu ekonomi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2011) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kegiatan dalam perekonomian yang mengalami perkembangan sehingga mengakibatkan barang atau jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah. Sasana (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari keadaan ekonomi dari suatu negara yang secara fisik mengalami perkembangan, seperti bertambahnya infrastruktur, jumlah produksi barang, dan penambahan serta perkembangan pada kegiatan-kegiatan ekonomi. Kondisi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi 2 faktor, yaitu ekonomi maupun nonekonomi. Secara ekonomi, faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, kemajuan teknologi, akumulasi modal, serta skala produksi. Sedangkan pada faktor non-ekonomi meliputi politik, sosial, dan budaya yang mampu memengaruhi kondisi perekonomian. Todaro (2003) membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 3 faktor atau komponen utama, yang terdiri atas:

1. Akumulasi modal, yaitu semua bentuk atau jenis investasi baru pada peralatan fisik, tanah, modal, maupun sumber daya manusia
2. Pertumbuhan penduduk yang digambarkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja
3. Kemajuan teknologi yang digambarkan dengan peningkatan aplikasi pengetahuan ilmiah baru dalam bentuk temuan dan inovasi yang berkaitan dengan modal manusia dan fisik.

Tarigan (2004) menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan pendapatan masyarakat yang terjadi atau yang diperoleh pada wilayah tersebut sebagai kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Penambahan pendapatan yang terjadi dapat diukur melalui nilai riil (harga konstan). Pertumbuhan ekonomi daerah secara umum dapat diketahui melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Sianturi dan Wiwoho, 2018).

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Harrod-Domar mencetuskan tentang teori pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk melengkapi teori pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan oleh Keynes. Harrod Domar menganggap faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yaitu pembentukan modal yang didapatkan dari akumulasi tabungan penduduk sehingga bermanfaat bagi kegiatan investasi (Idris, 2016:54). Asumsi teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar terdiri atas:

- a. Perekonomian dengan sifat yang tertutup
- b. Proses produksi yang dilakukan mempunyai koefisien tetap (*constan return to scale*)
- c. Hasrat menabung bersifat konstan
- d. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja bersifat konstan serupa dengan tingkat pertumbuhan penduduknya

Secara sistematis, model pertumbuhan ekonomi Harrod Domar dituliskan sebagai berikut (Idris, 2016:54):

$$g = s/v$$

dimana :

g = *Growth* (pertumbuhan ekonomi)

s = *marginal propensity to save*

v = rasio antara modal dengan output

agar terjadi keseimbangan, maka antara tabungan dan perbandingan modal dengan output harus saling berkaitan dan menyeimbangkan.

Harrod-Domar juga menganggap bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi pada suatu negara juga diperlukan adanya investasi baru sebagai tambahan neto terhadap cadangan modal (*capital stock*) atau tingkat pertumbuhan ekonomi akan berbanding lurus dengan nilai akumulasi modal yang meningkat. Oleh karena itu, terjadinya efektivitas pada belanja modal mampu meningkatkan aktivitas atau kegiatan ekonomi. Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya melalui hasil pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat adanya penambahan lapangan pekerjaan dari investasi atau belanja modal (Rusdiana, 2017).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow Swan (Neo Klasik)

Teori ini menjelaskan hubungan pertumbuhan jumlah penduduk, tabungan, serta teknologi yang saling memberikan pengaruh dan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi. Solow juga menjelaskan bagaimana akumulasi dari pertumbuhan populasi penduduk dan kapital yang berkaitan dengan tenaga kerja maupun perkembangan teknologi yang berinteraksi dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2000). Teori pertumbuhan neoklasik menggambarkan hubungan dari ketiga variabel tersebut dan menganalisis bagaimana akumulasi modal mampu memengaruhi pertumbuhan. Oleh karena itu dilakukan penentuan tingkat akumulasi kapital melalui permintaan dan penawaran. Pada tahap ini pula, perkembangan teknologi dan faktor pertumbuhan populasi dianggap *ceteris paribus*.

Analisis teori Solow menjelaskan bila fungsi produksi output (Y) adalah fungsi dari persediaan modal (K), tenaga kerja (L), dan teknologi (A). Oleh karena itu pula besarnya output akan dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut, maka bila digambarkan dalam bentuk persamaan menjadi sebagai berikut ini:

$$Y = f(K, L, A)$$

Tingkat pertumbuhan pada model Solow berasal dari tiga variabel tersebut, yaitu penambahan penawaran tenaga kerja, akumulasi modal, dan perkembangan teknologi yang akan digambarkan dari peningkatan *skill* ataupun kemajuan teknik yang mendorong peningkatan produktivitas. Model pada teori ini mengasumsikan bila fungsi produksi memiliki skala pengembalian yang tetap (*constant return to scale*). Sehingga, apabila jumlah input ditambahkan sebesar d kali, maka besaran output bertambah sebesar d kali. Bila dituliskan dalam persamaan menjadi seperti berikut ini:

$$dY = f(dK, dL, dA)$$

Pada teori pertumbuhan Solow, rasio modal terhadap *output* (*capital/output* = *COR*) dapat berubah karena sifatnya yang dinamis. Untuk menciptakan sejumlah *output* tertentu maka digunakanlah jumlah modal serta bantuan tenaga kerja yang berbeda pula jumlahnya sesuai kebutuhan. Apabila modal yang digunakan lebih banyak maka tenaga kerja yang digunakan akan lebih sedikit, dan begitu pula

sebaliknya. Maka, adanya fleksibilitas ini membuat perekonomian disuatu negara dalam memutuskan kombinasi modal atau tenaga kerja yang ingin digunakan memiliki kebebasan yang tidak terbatas dalam menghasilkan *output* tertentu (Mankiw, 2000).

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Ahli ekonomi Amerika Serikat yang bernama Walt W. Rostow menjelaskan mengenai tahap dari pertumbuhan ekonomi yang didasarkan dari pengalaman pembangunan yang dialami negara maju terutama di Eropa. Ia menciptakan formula pola pembangunan dengan tahapan evolusi dari suatu perkembangan ekonomi. Rostow mengklasifikasikan tahap pembangunan ekonomi menjadi lima tahapan (Chalid, 2010), yaitu:

a. Tahap perekonomian tradisional

Pada tahap ini, perekonomian cenderung bersifat subsistem. Penggunaan teknologi sangat terbatas dan sektor pertanian memiliki peran penting. Terbatasnya penggunaan teknologi mengakibatkan barang-barang yang diproduksi sebagian besar masih berupa bahan mentah. Kemampuan penguasaan sumber daya dipengaruhi adanya hubungan darah dalam keluarga.

b. Tahap sebelum lepas landas

Tahap ini menjadi tahap transisi yang semula masyarakat agraris menuju industri. Mulai berkembangnya sektor industri meskipun sektor pertanian tetap berperan penting dalam perekonomian. Tahap ini juga mulai terjadi perkembangan teknologi secara pesat, mulai bermunculan lembaga keuangan dalam menggerakkan keuangan masyarakat, investasi terjadi secara besar-besaran terutama pada industri manufaktur, dan berkembangnya industri-industri baru.

c. Tahap Lepas Landas

Tahap ini menjadi penentu secara keseluruhan atas proses pembangunan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam tahap ini mulai terjadi revolusi industri yang berkaitan dengan revolusi metode produksi. Tahap lepas landas digambarkan dalam tiga kondisi yang saling berkaitan, yakni:

- 1) Terjadinya kenaikan laju investasi produksi yang berkisar 5-10% dari pendapatan nasional
- 2) Berkembangnya sektor manufaktur dengan laju pertumbuhan yang tinggi
- 3) Datangnya kerangka politik, institusional, dan sosial secara cepat sehingga menimbulkan hasrat ekspansi disektor modern yang secara eksternal memberikan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi.

d. Tahap menuju kedewasaan

Tahap ini ditandai dengan penggunaan teknologi modern secara efektif pada sumber daya yang dimiliki. Tahap ini merupakan tahap jangka panjang dimana produksi dilakukan secara swadaya. Selain itu, kemuculan sektor-sektor baru tidak dapat dihindari. Ketika tahap ini terjadi, maka terdapat tiga perubahan penting pada suatu negara, yaitu:

- 1) Pengusaha yang pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus
- 2) Semula tenaga kerja tidak terdidik berubah menjadi tenaga terdidik
- 3) Masyarakat jenuh akan industrialisasi sehingga mengharapkan perubahan yang lebih.

e. Tahap konsumsi tinggi

Tahap ini merupakan tahap akhir dari pembangunan. Pada tahap ini terjadi migrasi dari masyarakat pusat kota menuju pinggiran kota secara besar-besaran, dibutuhkannya alat transportasi, terjadi perubahan orientasi yang mulanya pendekatan penawaran menjadi permintaan, pergeseran perilaku ekonomi juga terjadi perubahan yang semula fokus terhadap sisi produksi menjadi sisi konsumsi, masyarakat tidak lagi berpikir kesejahteraan pada cakupan individu namun kesejahteraan pada masyarakat luas.

Terdapat tiga kekuatan utama pada tahap konsumsi besar-besaran yang cenderung meningkatkan kesejahteraan yaitu:

- 1) Menerapkan kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan serta memengaruhi batas teritorial nasional
- 2) Membuat keputusan terkait pembangunan pusat perdagangan seperti jaringan rel kereta api, mobil, rumah, dan sebagainya

- 3) Berkeinginan untuk mempunyai negara yang sejahtera serta pendapatan nasional yang adil dan merata melalui pajak progresif, meningkatkan jaminan sosial, adanya fasilitas hiburan untuk pekerja (Chalid, 2010).

2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Otonomi daerah yang ditetapkan sejak 2001 menyebabkan terjadi pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah. Sebelumnya, pemerintah daerah bertindak sesuai dengan perintah pemerintah pusat, namun setelah berlakunya otonomi daerah berubah menjadi daerah otonom dengan wewenang serta tanggung jawab dalam mengatur daerahnya dan memfasilitasi pelayanan publik yang beragam sesuai kebutuhannya. Terkait dengan penyediaan pelayanan publik, maka pemerintah memiliki peran penting dalam memenuhi hajat hidup masyarakat, sehingga pemerintah harus mempertimbangkan ketika mengambil keputusan agar dampak nyata dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas atau pelayanan publik.

Amiruddin Idris (2016:31) menjelaskan bahwa pengeluaran negara disebut juga pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai setiap kegiatan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, pengeluaran pemerintah yang sangat beragam dapat diklasifikasikan ke dalam:

- a. Pengeluaran adalah investasi yang meningkatkan kekuatan serta ketahanan ekonomi di masa depan
- b. Pengeluaran secara langsung bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
- c. Pengeluaran secara tidak langsung merupakan penghematan terhadap pengeluaran di masa depan
- d. Pengeluaran untuk penyediaan kesempatan kerja dan penyebaran data beli yang lebih luas.

Amiruddin Idris (2016:32) mengklasifikasikan teori pengeluaran pemerintah menjadi dua bagian, yakni secara makro dan mikro.

a. Teori Makro

1) Teori Musgrave dan Rostow

Musgrave dan Rostow menjelaskan mengenai hubungan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, persentase investasi pemerintah lebih besar daripada total investasi karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana prasarana publik, misalnya kesehatan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Tahap menengah, investasi pemerintah tetap digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap ini terdapat peran dari investasi swasta yang semakin besar. Pemerintah tetap memiliki peran yang besar pada tahap ini karena kegagalan pasar terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi, maka pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik yang jumlahnya lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini terjadi perkembangan ekonomi yang mengakibatkan hubungan antar sektor semakin rumit (*complicated*).

Tahap selanjutnya adalah tahap lanjutan pembangunan ekonomi, dimana kegiatan pengeluaran pemerintah berubah dari menyediakan prasarana menjadi pengeluaran untuk kegiatan sosial, seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat (Idris, 2016:33). Selain itu, pada tahap ini investasi swasta dalam persentase *Gross National Product* (GNP) semakin besar dan investasi pemerintah dalam persentase *Gross National Product* (GNP) semakin kecil.

2) Hukum Wagner

Adolf Wagner menjelaskan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dalam perekonomian yang cenderung meningkat, yang didasarkan pada pengamatannya di negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang pada abad ke-19. Berkaitan dengan Hukum Wagner, terdapat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yaitu 1) meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, 2) meningkatnya fungsi kesejahteraan, 3) meningkatnya fungsi perbankan, dan 4) meningkatnya fungsi pembangunan. Selain itu, Wagner mengungkapkan bahwa dalam suatu perekonomian jika pendapatan

perkapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat (Idris, 2016:35).

Hukum Wagner dikenal dengan “*The Law of Expanding State Expenditure*”, pada hukum ini, Wagner menjelaskan mengapa peran pemerintah menjadi semakin besar, dikarenakan pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Wagner mendasarkan pendangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of the state* yang menganggap bahwa pemerintah sebagai individu yang bebas dalam bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya (Idris, 2016:36).

Hukum Wager diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PkPP1}{PPK1} < \frac{PkPP2}{PP2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPkn}$$

Keterangan:

P_kPP = Pengeluaran pemerintah per kapita

PKK = Pendapatan per kapita, yaitu *Gross Domestic Product*/
jumlah penduduk

1,2,...,n = jangka waktu (tahun)

3) Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiesaman menjelaskan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikenal dengan *The Displacement Effect*. Teori memiliki asumsi bahwa pemerintah selalu meningkatkan pengeluaran sedangkan masyarakat enggan untuk membayar pajak yang secara tidak langsung juga mengalami peningkatan akibat pengeluaran pemerintah yang tinggi. Peacock dan Wiseman menganggap bahwa masyarakat memiliki tingkat toleransi pajak, yang mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah dalam membiayai pengeluarannya. Tingkat toleransi ini menjadi kendala pemerintah dalam meningkatkan pungutan pajak. Teori ini juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi mengakibatkan pemungutan pajak yang dilakukan semakin meningkat meskipun tarif pajak tidak berubah, sehingga

meningkatnya penerimaan pajak ini berakibat pada pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat (Idris, 2016:37). Peacock dan Wiseman mengemukakan adanya toleransi pajak meskipun tidak menjelaskan berapa besarnya toleransi tersebut.

b. Teori Mikro

Teori mikro dalam melihat perkembangan pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab permintaan dan tersedianya barang publik. Permintaan dan penawaran barang publik berpengaruh terhadap penentuan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja (Idris, 2016:34). Teori mikro dirumuskan sebagai berikut ini:

1) Penentuan Permintaan

$$U_i = f(G, X)$$

Dimana,

G= vektor dari barang publik;

X= individu;

$i = 1, \dots, m$;

U= fungsi utilitas

Beberapa faktor dibawah ini dapat menjelaskan mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah, antara lain:

- a) Perubahan permintaan akan barang publik
- b) Perubahan harga faktor produksi
- c) Perubahan kualitas barang
- d) Perubahan dari kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang publik
- e) Perubahan kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

2) Penentuan tingkat output

Barang serta jasa publik yang disediakan pemerintah ditentukan oleh politisi dalam memilih jumlah yang akan dihasilkan. Mereka juga menentukan besarnya pajak yang akan dikenakan pada masyarakat dalam membiayai besarnya barang/jasa publik yang akan disediakan (Idris, 2016:35). Fungsi utilitas para politisi dapat dituliskan sebagai berikut ini:

$$U_p = g(X, G, S)$$

Dimana,

U_p = fungsi utilitas;

S = keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau kedudukan;

G = vektor barang publik;

X = vektor barang swasta.

2.1.3 Teori Pembagian Kekuasaan

Teori pembagian kekuasaan atau lebih dikenal dengan *Trias Politica* merupakan dasar dalam pembagian urusan pemerintahan dan pemahaman mengenai desentralisasi. Montesquieu dalam *Trias Politica* menyatakan ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif dipegang oleh satu orang yang sama tidak ada kebebasan, karena hal tersebut dapat menyebabkan monarki atau bersifat tirani, demikian juga kekuasaan yudikatif tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif (Sondakh, 2013). Berdasarkan *Trias Politica* tersebut muncul teori pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembagian kekuasaan merupakan dasar bagi pemerintahan yang beradab, dimana pembagian kekuasaan akan menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga sehingga terhindar dari pemusatan kekuasaan secara mutlak pada satu pihak (Muluk, 2009). Pembagian kekuasaan identik dengan pemecahan secara vertikal maupun horizontal. Miriam Budiardjo (2003:267) menjelaskan perbedaan pembagian secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, pembagian kekuasaan didasarkan pada tingkatannya dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, dimana Carl J. Friedrich menggunakan istilah *territorial division of power*. Sedangkan secara horizontal, pembagian kekuasaan didasarkan pada fungsi secara horizontal, dimana ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dikenal dengan *Trias Politica* atau *division of power*. Mahfud (1999) menyatakan pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan pemerintah daerah yang otonom sebagai implikasi dari desentralisasi. Terwujudnya desentralisasi tentunya telah dilakukan dengan

membagi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adanya pembagian urusan pemerintahan ini menjadikan pemerintah daerah mengetahui kewenangannya dan tidak mengurus yang bukan menjadi kewenangannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membagi urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.1.4 Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah dan masyarakatnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan.

Hakikat pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya hak penuh untuk mengurus dan menjalankan sendiri apa yang menjadi bagian atau wewenang dari pemerintah daerah. Di Indonesia, otonomi daerah berarti bahwa terjadi pelimpahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah (*subnational jurisdiction*) untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan (Saragih, 2003). Pemberian atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan dan tidak lagi bertanggung jawab terhadap bidang-bidang pemerintahan yang sudah tidak lagi menjadi kewenangannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, wewenang pemerintah pusat yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah yaitu wewenang yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, pengaturan kebijakan moneter dan fiskal nasional, mendirikan lembaga peradilan, serta pengaturan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan.

Otonomi daerah dilaksanakan di beberapa negara termasuk Indonesia, dikarenakan beberapa hal misalnya luas wilayah suatu negara, besarnya jumlah dan keanekaragaman penduduk serta budayanya (Saragih, 2003). Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi setiap daerah yang berbeda, penerapan pembangunan secara sentralisasi justru akan menimbulkan ketimpangan, sehingga sistem desentralisasi atau otonomi perlu dilaksanakan mengingat pembangunan ekonomi yang kurang efektif dari sistem sentralisasi. Selain itu, adanya otonomi daerah diharapkan mampu mendekatkan fungsi pelayanan birokrasi pemerintahan terhadap rakyat melalui pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Safitri *et al.*, 2020).

Pemerintah dalam membentuk daerah otonom memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1. Kondisi ini juga yang mendasari bahwa tidak setiap daerah siap untuk melaksanakan otonomi daerah. Daerah-daerah yang tidak sanggup melaksanakan otonomi daerah mengalami beberapa permasalahan, misalnya ketiadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), dana pendukung yang kurang dalam pelaksanaan pemerintah daerah.

2.1.5 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal menurut Machfud Siddik (2002) merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, dimana tujuan utama adalah memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Saragih (2003) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal adalah proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Menurut Robert Simanjuntak (2002), secara umum sasaran desentralisasi fiskal di Indonesia adalah:

- a. Memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan daerah
- b. Mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah
- d. Mengurangi ketimpangan antar daerah
- e. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum

Desentralisasi fiskal dapat diukur melalui dua sisi, yaitu dari sisi pengeluaran dan penerimaan daerah. Dari sisi penerimaan dalam fungsi desentralisasi, daerah memiliki kebijakan untuk melaksanakan besaran dan sektor apa yang akan dibelanjakan (kecuali DAK karena digunakan untuk kebutuhan khusus). Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (Nurcholis, 2005). Sedangkan dari sisi pengeluaran, pemerintah daerah mengalokasikan pendapatan daerahnya untuk belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pembiayaan daerah.

2.1.6 Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal atau derajat otonomi fiskal adalah aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Radianto (1997), derajat desentralisasi fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lainnya. Pernyataan tersebut didukung oleh Jandi (2014) yang menjelaskan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sistiana dan Makmur, 2014).

Analisis yang digunakan untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal atau yang disebut otonomi fiskal daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan (Putra dan Hidayat, 2016). Rumus dari perhitungan derajat desentralisasi fiskal adalah :

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Selanjutnya, rasio ini dapat dijelaskan dengan melihat skala interval yang ditemukan oleh Hanafi dan Mugroho (2009) dari tim KKPFE UGM, yaitu:

Tabel 2.1 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

DDF (%)	Keterangan
0,00 – 10,00 %	Sangat Kurang
10,01 – 20,00 %	Kurang
20,01 – 30,00 %	Sedang
30,01 – 40,00 %	Cukup
40,01 – 50,00 %	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: Hanafi dan Mugroho, 2009

2.1.7 Sumber Pendapatan Keuangan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih berbeda dengan penerimaan daerah yang merupakan uang masuk ke kas daerah (Wulandari dan Iryanie, 2018). Menurut UU No. 33 Tahun 2004, pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun tersebut. Pendapatan daerah terdiri dari tiga sumber, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang sesuai perundang-undangan dengan cara pemungutan. PAD yang dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya sesuai potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Saragih, 2003). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (1) menjelaskan PAD sebagai penerimaan yang

diperoleh daerah yang berasal dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan yang sesuai perundang-undangan.

Usaha dalam meningkatkan PAD mengharuskan daerah untuk tidak menetapkan peraturan tentang pendapatan yang berdampak terhadap peningkatan biaya, menghambat mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa antar daerah maupun kegiatan ekspor dan impor. Peraturan tentang pendapatan yang berakibat pada ekonomi biaya tinggi merupakan peraturan yang mengatur tentang pengenaan pajak serta retribusi terhadap objek pajak oleh level pemerintah di atasnya. Kondisi ini mampu menurunkan daya saing daerah. Peraturan daerah yang berdampak terhadap penghambatan mobilitas penduduk maupun barang dan jasa adalah retribusi izin masuk, pajak atau retribusi atas peneluaran ataupun pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lainnya. Sumber pendapatan utama yang dijadikan parameter dalam menentukan derajat otonomi fiskal yaitu pendapatan yang bersumber dari sumber yang dikelola pemerintah daerah yang bersangkutan (Saragih, 2003).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjadi sumber PAD terbagi menjadi empat, yang meliputi:

- 1) Pajak daerah adalah kontribusi wajib dari setiap individu maupun badan kepada daerah yang sifatnya memaksa dengan berdasar pada undang-undang. Sifat lain dari pajak yaitu individu atau pembayar pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung sebab pajak digunakan untuk keperluan daerah dengan tujuan kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah diperoleh dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak air permukaan, dan pajak rokok.
- 2) Retribusi daerah, merupakan pungutan yang dilakukan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang penyediaannya khusus diberikan pemerintah kepada masyarakat secara individu maupun badan. Retribusi daerah terbagi menjadi tiga jenis yakni jasa umum, jasa khusus, dan perizinan tertentu.

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba BUD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga
- 4) Lain-lain PAD yang sah, meliputi penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah misalnya jasa giro, pendapatan bunga, dan hasil penjualan asset daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Wulandari dan Iryanie, 2018). Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (secara vertikal) serta antar pemerintah daerah (secara horizontal). Dana perimbangan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu:

- 1) Dana Bagi Hasil, merupakan dana yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sumber dari pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Sumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, perikanan, dan pertambangan.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang dialokasikan kepada semua daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Pada APBN, DAU merupakan salah satu komponen belanja, sedangkan dalam APBD dana ini merupakan salah satu komponen pendapatan.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah otonom tertentu. DAK bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah sesuai prioritas nasional serta sesuai fungsi yang ditetapkan dalam APBN (Wulandari dan Iryanie, 2018)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk pada jenis pajak maupun retribusi daerah serta pendapatan dinas.

Pendapatan ini berasal dari hibah atau bantuan pemerintah pusat maupun daerah lainnya, kelompok masyarakat ataupun perorangan, badan atau organisasi swasta, serta lembaga luar negeri yang bersifat tidak mengikat. Pendapatan ini bersifat sebagai dana darurat untuk penanggulangan bencana, dana penyesuaian, dana bagi hasil pajak dari teknis kepada kabupaten atau kota, serta bantuan keuangan dari teknis atau daerah lainnya (Wulandari dan Iryanie, 2018).

2.1.8 Belanja Modal

Secara makro, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu variabel pembentuk PDB selain dari konsumsi masyarakat dan investasi (Azwar, 2016). Kebijakan ini menjadi bagian dari intervensi pemerintah dalam kebijakan fiskal melalui pemenuhan kebutuhan publik dengan mekanisme pengadaan jasa atau barang oleh pemerintah melalui kegiatan belanja pemerintah. Pengadaan yang dilakukan pemerintah berperan penting terhadap pelaksanaan APBN maupun APBD melalui belanja pegawai, barang, bantuan sosial, modal, dan hibah.

Belanja modal merupakan salah satu bentuk dari belanja daerah pada APBD yang memiliki pengertian yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membentuk modal yang bersifat menambah aset tetap atau investaris pemerintah, menambah anggaran rutin untuk biaya operasional serta biaya pemeliharaan yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Buana, A. L., *et al.*, 2019; Mardiasmo, 2009). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, jenis belanja modal diantaranya adalah belanja modal tanah, mesin dan peralatan, gedung dan bangunan, jalan, serta belanja modal fisik lainnya.

Berkaitan dengan belanja modal, efektivitas yang merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi menggambarkan jangkauan akibat (*outcome*) dari output program pemerintah dalam mengimplementasikan kemandirian fiskal melalui peningkatan kapasitas dengan input belanja modal. Input terbagi menjadi dua yaitu input primer dan sekunder. Input primer sendiri merupakan sejumlah dana yang dianggarkan dalam APBD untuk pengeluaran investasi pemerintah. Sedangkan input sekunder merupakan aktivitas akumulasi modal pemerintah (obligasi, saham,

dan pembangunan infrastruktur). Output merupakan hasil dari belanja modal, seperti penyediaan dan pelayanan barang publik (Rusdiana, 2017).

2.1.9 Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2 tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat luas. Pengertian lainnya dari tenaga kerja yaitu penduduk yang termasuk kedalam usia kerja dengan usia 15-64 tahun atau jumlah seluruh penduduk yang dapat memproduksi barang serta jasa ketika terjadi permintaan sehingga dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut (Subri, 2003). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat dua jenis penduduk dalam pekerjaan, yaitu penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah usia 15-64 tahun. Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja merupakan tenaga kerja atau penduduk yang masuk dalam usia kerja yang bekerja, atau memiliki pekerjaan namun untuk sementara waktu tidak sedang bekerja atau sedang dalam mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja merupakan penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau ibu rumah tangga yang bukan wanita pekerja serta menerima pendapatan namun bukan imbalan langsung atas jasa kerjanya seperti dana pensiunan (BPS Jawa Timur, 2019).

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikasi besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah serta menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (BPS Jawa Timur, 2019). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan angka perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yang biasanya dinyatakan dengan rumus:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas)}} \times 100\%$$

Terdapat sebuah karakteristik dalam menghitung TPAK, yaitu dihitung berdasarkan karakteristik angkatan kerja, yaitu menurut umur dan jenis kelamin. TPAK usia sekolah umumnya selalu rendah, karena banyak diantara mereka masih bersekolah. Sedangkan, TPAK wanita di negara berkembang selalu jauh lebih rendah daripada TPAK laki-laki karena kebanyakan dari mereka hanya mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, sedangkan laki-laki merupakan pencari nafkah dalam rumah tangga (Bappenas, 2008). Selain itu, dalam penentuan TPAK, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi (Sumarsono, 2009), yaitu: 1) Jumlah penduduk yang masih bersekolah, 2) Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga, 3) Tingkat penghasilan keluarga, 4) Struktur usia, 5) Tingkat upah, 6) Tingkat pendidikan, 7) Kegiatan perekonomian.

2.1.10 Hubungan Derajat Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Wewenang yang dimaksud adalah mengelola pendapatan daerahnya, penentuan anggaran dan pegalokasian sumber daya yang dimiliki daerah untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kewenangan secara fiskal dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama dari sisi belanja, dimana daerah otonom didasarkan atas prinsip alokasi sumber daya agar lebih efisien dan efektif maka pemerintah daerah dianggap lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah pusat. Kedua, dari sisi pendapatan, pemerintah daerah diberikan kewenangan perpajakan agar partisipasi masyarakat lebih tinggi untuk membiayai kebutuhan publik (Putra dan Hidayat, 2016).

Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, karena pemerintah daerah sebagai pihak yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih tahu akan kondisi perekonomian daerahnya, bisa lebih efektif dalam menggali potensi daerahnya melalui APBD yang telah tersedia. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Aksari (2017)

bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dikarenakan pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan sejalan dengan meningkatnya sumber-sumber pendanaan daerah, karena desentralisasi fiskal. Namun, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Saputra dan Mahmudi (2012) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal ternyata menunjukkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dikarenakan pemerintah daerah lemah dalam pengelolaan anggaran sehingga menyebabkan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi

2.1.11 Hubungan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal adalah belanja yang digunakan pemerintah untuk membentuk investasi atau modal seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, serta bentuk fisik lainnya yang dialokasikan dalam mendorong pembiayaan aktivitas pembangunan infrastruktur yang secara tidak langsung juga mendorong penciptaan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Secara mikro, perkembangan pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang memengaruhi permintaan akan barang publik dan faktor yang memengaruhi ketersediaannya. Terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran akan barang publik akan menentukan jumlah barang yang akan disediakan melalui anggaran belanja yang dikeluarkan (Azwar, 2016).

John Maynard Keynes menjelaskan bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat melalui peningkatan permintaan konsumsi dan pengeluaran pemerintah (Rafiq, 2016). Dalam hal ini, Keynes memiliki satu variabel yang berbeda dengan teori-teori lainnya, yaitu adanya campur tangan pemerintah, dimana terdapat peran pemerintah dalam hal penggunaan anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan salah satunya yaitu belanja modal guna mendukung produktivitas dalam negeri. Belanja modal juga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, karena belanja modal menghasilkan penyediaan barang publik dan pelayanan kebutuhan publik yang dapat membantu

meningkatkan aktivitas perekonomian yang digambarkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (Rusdiana, 2017). Tidak hanya berpengaruh secara positif, belanja modal juga bisa berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dikarenakan kurang tepatnya kebijakan pengalokasian belanja modal. Sehingga, peningkatan belanja modal tidak mampu mendorong peningkatan permintaan produksi daerah (Fajri, 2016).

2.1.12 Hubungan Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi

Todaro (2000) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah tenaga kerja juga akan meningkatkan tingkat produksi. Selain itu, Todaro juga menganggap bahwa adanya pertumbuhan penduduk lebih besar menandakan bahwa ukuran pasar domestiknya juga lebih besar. Todaro juga menjelaskan bahwa terdapat 3 komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal (investasi baru, peralatan fisik, dan sumber daya manusia), pertumbuhan penduduk yang menambah jumlah angkatan kerja, dan kemajuan teknologi (Rahmawati, 2019). Penjelasan tersebut sejalan dengan teori Solow Swan (Neo Klasik) bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung dari pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) serta tingkat kemajuan teknologi.

Pernyataan di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2019), dimana tenaga kerja yang diproksi dengan TPAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dikarenakan jumlah tenaga kerja yang meningkat akan berdampak pada peningkatan produktivitas, sehingga produktivitas yang meningkat akan meningkatkan output dan akhirnya memicu kenaikan PDB sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hasil serupa juga didapatkan pada penelitian Sunardi *et al.*, (2017), dimana TPAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dikarenakan jumlah penduduk usia kerja bertambah sehingga angkatan kerjapun juga bertambah. Bertambahnya angkatan kerja harus diimbangi dengan tingginya produktivitas kerja agar mampu meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Hidayat (2016) menemukan hasil yang lain, bahwa TPAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum mampu memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan. Sehingga, ketika TPAK meningkat tidak diimbangi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan dan menyebabkan bertambahnya pengangguran yang secara langsung menurunkan pendapatan perkapita dan berdampak pada menurunnya PDRB.

2.2 Penelitian Terdahulu

Derajat desentralisasi fiskal memberikan gambaran tentang tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat, jika derajat desentralisasi fiskal pada suatu daerah rendah maka, ketergantungan keuangan daerah tersebut kepada pemerintah pusat masih tinggi, begitupula sebaliknya (Sistiana dan Makmur, 2014). Penelitian tentang derajat desentralisasi fiskal dilakukan oleh Mega Sistiana dan M. Hadi Makmur (2014). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dimana hasil yang diperoleh dilihat dari tiga sisi, yaitu sisi PAD terhadap TPD, sisi rasio sumbangan daerah terhadap TPD, serta sisi rasio BHPBP terhadap TPD, disimpulkan bahwa keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemberian dana dari pemerintah pusat.

Adya Utami Syukri (2019) melakukan penelitian mengenai desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Selain itu, kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Selatan cenderung berfluktuatif.

Terkait hubungan derajat desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, Sirajudin Al-Aksari (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo. Metode analisis yang digunakan adalah analisis derajat desentralisasi fiskal dan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai derajat desentralisasi

fiskal selama periode 2003-2010 pada Kabupaten Bungo rata-rata mengalami peningkatan. Hal ini sangat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bungo terutama pada PAD. Selain itu, desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo.

Muhammad Noor Sandi Hidayat (2016) melakukan penelitian terkait dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menggunakan alat analisis regresi data panel ditemukan hasil bahwa penerimaan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, sedangkan desentralisasi dari sisi pengeluaran menyebabkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Yody Prawira Sunardi *et al.*, (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Metode analisis yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS) dengan data time series periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan jika PAD, TPAK, dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Zhou Yang (2016) melakukan penelitian terhadap perubahan kebijakan desentralisasi fiskal yang berkaitan dengan adanya reformasi pajak di Cina pada tahun 1994. Penelitian dilakukan menggunakan data panel yaitu 29 Provinsi di Tiongkok dengan periode 1990-2012. Alat analisis yang digunakan adalah *Panel Quantil Regressions*. Hasil yang ditunjukkan adalah desentralisasi pendapatan dan pengeluaran memiliki efek terhadap pertumbuhan ekonomi yang bervariasi di tiga sektor utama, dampak yang paling besar didapatkan oleh sektor sekunder. Selain itu, terdapat perbedaan respon atas perubahan desentralisasi pendapatan dan pengeluaran antara provinsi yang tumbuh secara cepat dan lambat, dimana provinsi yang tumbuh secara cepat merespon lebih besar terhadap perubahan tersebut.

Bambang Saputra dan Mahmudi (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*), dimana ditemukan hasil bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengaruh positif ditunjukkan oleh hubungan antara desentralisasi fiskal dengan kesejahteraan masyarakat.

Andarwati Rusdiana (2017) melakukan penelitian terkait kemandirian fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah regresi persamaan simultan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah kemandirian fiskal dan rasio belanja pegawai berpengaruh signifikan namun negatif terhadap belanja modal. Selain itu, investasi pemerintah dan kemandirian fiskal tidak signifikan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah masih dipengaruhi sektor investasi swasta.

Andrey Yushkov (2015) melakukan penelitian yang membahas mengenai hubungan teoritis dan empiris dari desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. data yang digunakan merupakan data panel dengan jumlah 78 daerah di Rusia dengan kurun waktu 2005-2012. Metode yang digunakan adalah *empirical analysis*. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah desentralisasi pengeluaran berhubungan secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Rusia. Sedangkan ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat berhubungan secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Febrian Dwi Prakarsa (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh PAD dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dengan kurun waktu 2008-2012. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan model *random effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Selain itu, belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Pengaruh dari belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur adalah signifikan namun negatif.

Regina Niken W (2013) melakukan penelitian terkait dengan pengoptimalan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, hambatan, serta strategi pada pengelolaan aset daerah agar PAD Kabupaten Jember dapat optimal. Penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif, SWOT, dan AHP (*Anlytical Hierarchy Process*). Hasil penelitian menunjukkan suatu strategi yang tepat bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam mengelola aset daerah adalah strategi defensif, sehingga kebijakan optimasi manajemen aset dapat dipenuhi untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung dan sumber daya manusia yang memadai dalam pengembangan kemitraan dengan pihak ketiga.

Khusnul Khotimah (2019) melakukan penelitian terkait pengaruh dari *Brain Drain*, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran terdidik di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan modal terbaik yaitu *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Brain Drain* dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik universitas di Indonesia. Namun, variabel upah minimum provinsi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran terdidik lulusan universitas di Indonesia.

Indah Puspitasari *et al.*, (2018) melakukan penelitian mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Batu tahun 2011-2015. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perkembangan pendapatan sektor pariwisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kota Batu. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kontribusi dan analisis trend (kecenderungan). Dimana hasil yang didapatkan adalah perkembangan pendapatan sektor pariwisata cenderung meningkat yang diikuti pula dengan jumlah pengunjung objek wisata pada periode tersebut juga meningkat. Kontribusi pendapatan pada sektor pariwisata berfluktuatif namun cenderung turun, sehingga diperlukan suatu pengembangan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari sektor pariwisata.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Mega Sistiana dan M. Hadi Makmur, 2014	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010	Deskriptif kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari sisi PAD terhadap TPD, DDF kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki persentase sebesar 8%, sehingga dikategorikan sangat rendah 2. Dari sisi rasio sumbangan daerah terhadap TPD, DDF memiliki persentase sebesar 83%, sehingga dikategorikan tinggi 3. Dari sisi rasio BHPBP terhadap TPD, DDF memiliki persentase sebesar 9%, sehingga dikategorikan sangat rendah 4. Hasil dari ketiga perhitungan tersebut disimpulkan bahwa keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemberian dana dari pemerintah
2.	Adya Utami Syukri, 2019	Anomali Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah; Upaya Mengakselerasi Penerimaan Daerah	Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	<ol style="list-style-type: none"> 1. DDF Provinsi Sulawesi Selatan memiliki persentase sebesar 54,17%. Artinya, Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah 2. Selama periode 2008-2017, kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Selatan cenderung berfluktuatif 3. <i>Tax Effort</i> Provinsi Sulawesi Selatan memiliki persentase sebesar 0,82%. Artinya, penerimaan lebih kecil daripada potensi pajak dan retribusi
3.	Sirajudin Al-Aksari, 2017	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo	Analisis derajat desentralisasi fiskal dan regresi linier sederhana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Derajat Desentralisasi Fiskal selama periode 2003-2013 di Kabupaten Bungo mengalami peningkatan. Hal ini sangat berpengaruh pada PAD dalam hal pengembangan kinerja keuangan pemerintahan 2. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo yang mencapai 7,6%.
4.	Muhammad Noor Sandi Hidayat, 2016	Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa Timur (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur)	Regresi data panel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur 2. Desentralisasi pengeluaran menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi secara signifikan 3. TPAK memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi

5.	Yody Prawira Sunardi, Vekie A. Rumate, dan Hanly F. Dj Siwa, 2017	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2. Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 3. TPAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
6.	Bambang Saputra dan Mahmudi, 2012	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Analisis jalur	1. Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat 3. Desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat
7.	Zhou Yang, 2016	<i>Tax Reform, Fiscal Decentralization, and Regional Economic Growth: New Evidence from China</i>	<i>Panel Regressions</i>	1. Desentralisasi pendapatan dan pengeluaran memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dimana efeknya bervariasi ditiga sektor utama, dampak terbesar pada sektor sekunder 2. Provinsi yang memiliki tumbuh secara lambat dan cepat merespon secara berbeda terhadap perubahan desentralisasi pendapatan
8.	Andarwati Rusdiana, 2017	Analisis Kemandirian Fiskal Dalam Era Otonomi dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jawa Timur	Analisis regresi persamaan simultan	1. Kemandirian fiskal dan rasio belanja pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal 2. Investasi pemerintah dan kemandirian fiskal tidak signifikan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah masih dipengaruhi sektor investasi swasta
9.	Andrey Yushkov, 2015	<i>Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth: Theory, Emprirics, and The Russian Experience</i>	<i>Empirical analysis</i>	1. Berdasarkan analisis empiris, desentralisasi pengeluaran di Rusia menunjukkan hubungan secara signifikan namun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

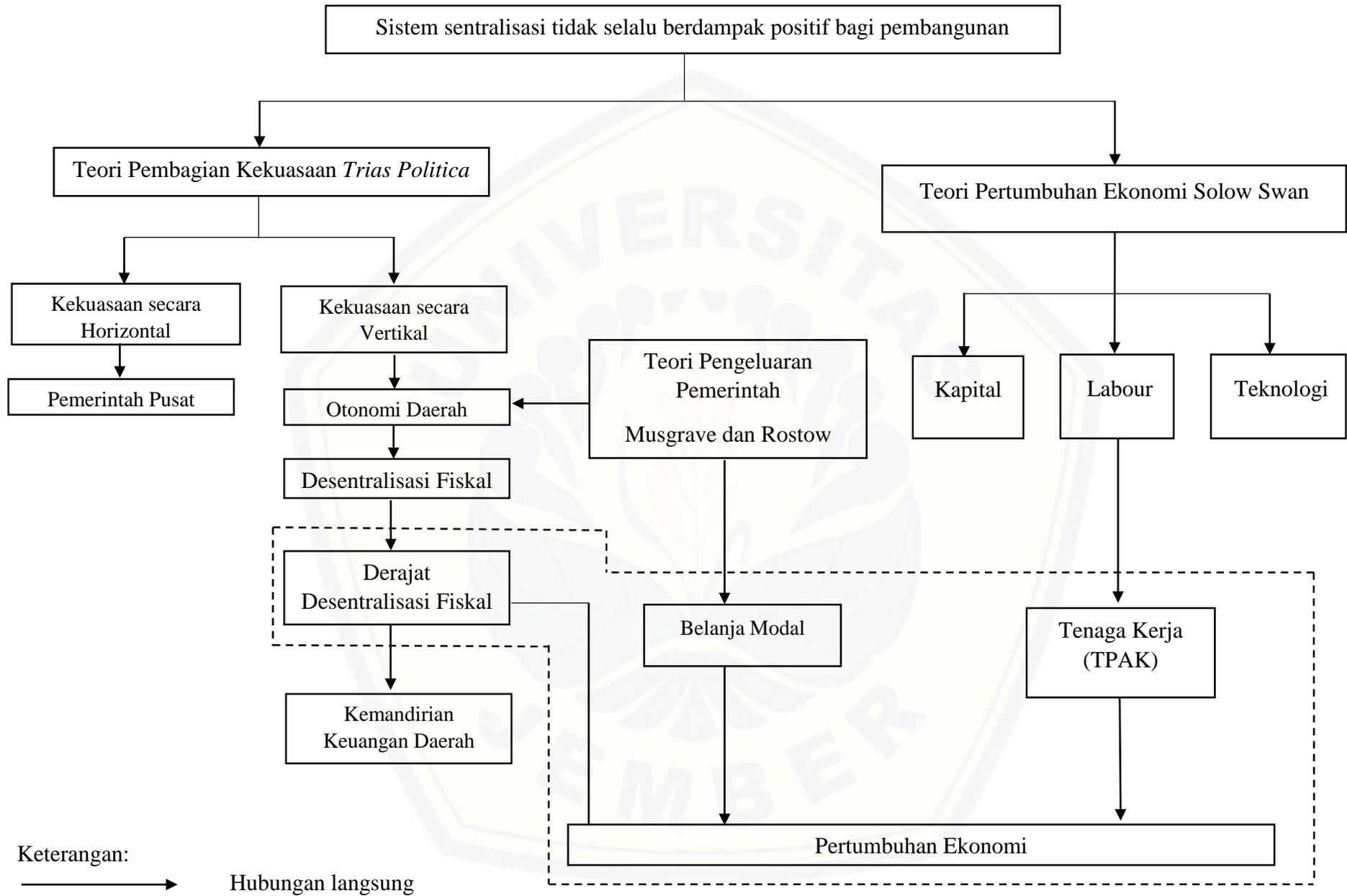
10. Febrian Dwi Prakarsa, 2014	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012)	Analisis data panel (<i>Random Effect Model</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAD berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur 2. Belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur 3. Belanja modal berpengaruh signifikan namun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur
11. Regina Niken W, 2013	Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah	Analisis deskriptif, SWOT, dan <i>Anlytical Hierarchy Process</i> (AHP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi yang tepat bagi pemerintah dalam mengelola aset daerah Jember adalah strategi defensif, sehingga kebijakan optimasi manajemen aset dapat dipenuhi untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung dan sumber daya manusia yang memadai dalam pengembangan kemitraan dengan pihak ketiga
12. Khusnul Khotimah, 2019	Pengaruh <i>Brain Drain</i> , Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia	Regresi data panel (<i>Fixed Effect Model</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brain Drain, pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran terdidik lulusan universitas di Indonesia 2. Upah minimum provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik lulusan universitas di Indonesia
13. Indah Puspitasari, Moh Saleh & Duwi Yunitasari, 2018	Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Periode Tahun 2011-2015	Analisis kontribusi dan analisis trend (kecenderungan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan pendapatan sektor pariwisata cenderung meningkat, begitupula dengan jumlah pengunjung objek wisata mengalami peningkatan 2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD berfluktuasi, dimana pengaruhnya cenderung turun

2.3 Kerangka Konsep

Terjadi perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu dari sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan sistem pemerintahan ini dikarenakan terdapat permasalahan dalam pembangunan yaitu disintegrasi, ketimpangan pembangunan, kemiskinan, kualitas hidup masyarakat rendah, serta permasalahan pada pembangunan sumber daya. Hal ini menyebabkan sistem sentralisasi dirasa tidak selalu berdampak positif terhadap pembangunan di Indonesia (Febriantoko, 2017; Sianturi dan Miyastro, 2011).

Perubahan sistem pemerintahan diikuti dengan pendistribusian wewenang atau pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian dilakukan secara horizontal dan vertikal, dimana pembagian secara vertikal melahirkan pemerintah daerah yang otonom sebagai implikasi dari desentralisasi (Mahfud, 1999). Desentralisasi fiskal memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih baik, sehingga terjadi penyerahan wewenang terkait anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola pendapatan daerah, menentukan anggaran serta mengalokasikan sumber daya. (Siddik, 2002; Saragih, 2003). Kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilihat melalui Derajat Desentralisasi Fiskal, dimana hal ini dapat menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat serta kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya (Jandi, 2014; Sistiana dan Makmur, 2014).

Selanjutnya pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran pemerintah yang merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi (Idris, 2016). Musgrave dan Rostow menjelaskan mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, bahwa investasi pemerintah akan semakin kecil sejalan dengan berkembangnya tahap-tahap pembangunan ekonomi (Idris, 2016). Setelah dilaksanakan pembangunan ekonomi, maka terjadi pertumbuhan ekonomi. Menurut Solow Swan pertumbuhan ekonomi didorong oleh 3 faktor, yaitu kapital, *labour*, dan teknologi.



Keterangan:

—————> Hubungan langsung

- - - - - Ruang lingkup peneliti

Gambar 2.1 Kerangka Konsep

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara dari rumusan masalah yang tersusun berdasarkan fenomena dan teori yang terjadi. Berdasarkan teori serta kajian literatur terdahulu, hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

H2: Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

H3: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

2.5 Asumsi Penelitian

Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Fokus dari penelitian ini yaitu pada kabupaten/kota yang terletak di Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur, yang meliputi Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, dan Kota Batu.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan dan karakteristik permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka dapat diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif kuantitatif dan *eksplanatory*. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan studi data sekunder atau analisis isi (*content analysis*) (Sistiana dan Makmur, 2014). Sedangkan jenis penelitian *eksplanatory* akan menguji hubungan antar variabel yang telah dihipotesiskan untuk diuji kebenarannya. Hipotesis sendiri yaitu hubungan antara dua atau lebih variabel yang digunakan dalam penelitian untuk diketahui kebenarannya dengan memberikan bukti atau fakta dari hasil penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang menekankan pada data numerik untuk kemudian diolah secara statistika (Azwar, 2007).

3.1.1 Waktu dan Tempat Penelitian

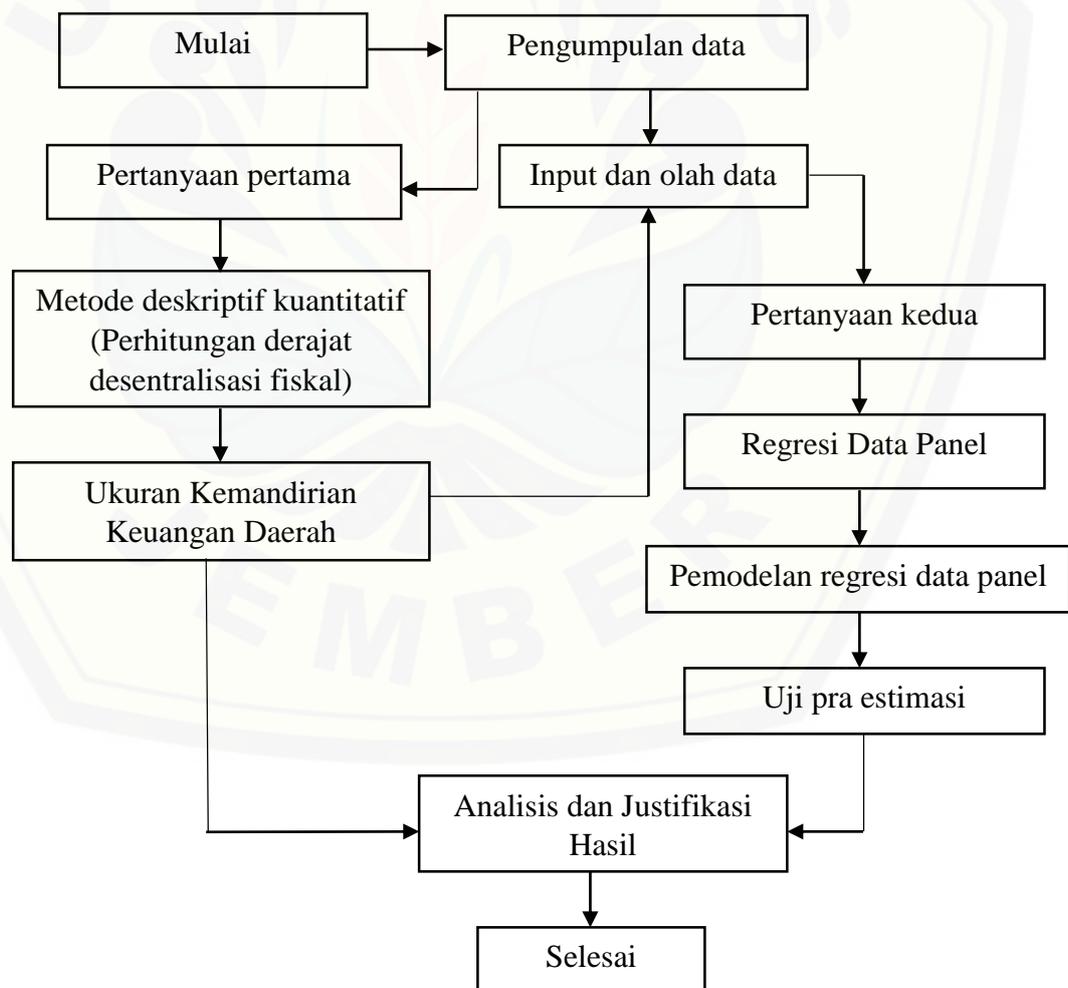
Ruang lingkup pada penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan Kabupaten/Kota yang terletak di Koridor Utara Selatan antara lain, Kabupaten Blitar, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, dan Kota Blitar, Malang, Pasuruan, Mojokerto, Surabaya, serta Kota Batu. Kurun waktu pada penelitian ini adalah periode tahun 2014-2018.

3.1.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang diperoleh dari instansi atau pihak lainnya. Bentuk data dapat diperoleh dari publikasi yang disajikan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Sedangkan data panel adalah data gabungan yang berjenis *time series* dan *cross section*. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal, penelitian terdahulu, buku, dan publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu.

3.2 Desain Penelitian

Pada kerangka penelitian menggambarkan alur penelitian dari awal hingga akhir dalam mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian secara efisien dan sistematis. Pada kerangka penelitian dijelaskan melalui bagan-bagan tertentu untuk menjelaskan isi penelitian baik alur pada penelitian, pencarian dan input data, serta proses mengelolah data yang sesuai dengan metode yang digunakan. Selanjutnya, agar pertanyaan pada rumusan masalah mendapatkan jawaban, digunakan dua metode. Metode pertama yang digunakan agar rumusan masalah pertama terjawab adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu analisis derajat desentralisasi fiskal, sedangkan metode untuk menjawab rumusan masalah yang kedua adalah analisis regresi data panel. Penelitian ini menggunakan Eviews 9 sebagai alat input dan analisis data.



Gambar 3.1 Desain Metode Penulisan (Sumber: Penulis, 2020)

3.3 Metode Analisis Data

Terdapat 2 metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

3.3.1 Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan pada Provinsi Jawa Timur. Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung melalui rumus berikut:

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Pendapatan Daerah

3.3.2 Analisis Regresi Data Panel

Metode analisis kedua yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi data panel (*pooled data*) yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Belanja Modal (BM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Metode PLS sendiri adalah turunan dari OLS namun datanya berbentuk panel. Secara umum, regresi berganda yang menggunakan OLS mempunyai tujuan untuk melihat dan mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui beberapa tahap pengujian seperti uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

Merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat (2016) dengan judul “Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa Timur (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur) dalam penelitiannya, variabel yang digunakan yaitu PDRB ADHK, desentralisasi penerimaan dan pengeluaran, investasi, serta TPAK.

$$Y_{it} = C + X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + e \quad (3.1)$$

Penelitian selanjutnya, merujuk pada penelitian Rusdiana (2017) dengan judul “Analisis Kemandirian Fiskal Dalam Era Otonomi dan Pengaruhnya Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jawa Timur”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, kemandirian fiskal, rasio belanja modal dan pegawai, IPM, dan Dummy. Pada Penelitian ini terdapat 2 model yaitu:

$$BM = a + \beta_1 DF + \beta_2 BP + D + \varepsilon \quad (3.2)$$

$$Y = a + \beta_1 BM + \beta_3 IPM + \varepsilon \quad (3.3)$$

Dalam penelitian ini, akan digabungkan beberapa variabel seperti pertumbuhan ekonomi, DDF, belanja modal, dan TPAK. Sehingga, fungsi model dalam penelitian ini yaitu:

$$PE = f(DDF, BM, TPAK) \quad (3.4)$$

Sehingga, model penelitiannya menjadi:

$$PE = \alpha + \beta_1 DDF + \beta_2 BM + \beta_3 TPAK \quad (3.5)$$

Selanjutnya fungsi tersebut ditransformasikan dalam model ekonometrika sebagai berikut:

$$PE_{it} = a + \beta_1 DDF_{i,t} + \beta_2 BM_{i,t} + \beta_3 TPAK_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3.6)$$

dimana,

PE = Pertumbuhan ekonomi

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

BM = Belanja Modal

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

a = *Intercept*

β_1, β_2 = Koefisien variabel

ε = *Error term*

i = *Cross section* (kabupaten/kota pada Koridor Utara Selatan Jawa Timur)

t = *Time series* (2014-2018)

3.4 Metode Analisis Regresi Data Panel

Terdapat beberapa tahap pengujian yang dilakukan untuk mengestimasi model data panel yang meliputi uji regresi data panel, uji statistik yang terdiri atas uji-t, uji-f, dan koefisien determinasi. Terakhir dilakukan uji asumsi klasik untuk

melihat estimasi apakah memenuhi asumsi dasar *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) yang meliputi uji autokorelasi, heterokedastisitas, normalitas, dan uji multikolinearitas.

3.4.1 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi berganda merupakan persatuan persamaan garis regresi yang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen (Supranto, 2009). OLS memiliki beberapa kelebihan dalam penggunaannya yang meliputi:

- a. Penggunaan OLS maupun prosedur perhitungan yang dilakukan sangatlah sederhana dibandingkan metode ekonometrika lainnya;
- b. Estimasi parameter yang diperoleh melalui OLS mempunyai beberapa ciri optimal;
- c. Mekanisme perhitungan OLS yang dilakukan bersifat sederhana dan mudah untuk dipahami.

Secara umum, regresi berganda dengan menggunakan OLS memiliki tujuan mengetahui besarnya pengaruh atas variabel independen terhadap variabel dependen melalui beberapa tahap pengujian seperti uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Tujuan lain dari dilakukannya regresi yaitu untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel terikat maupun variabel bebas. Selain itu, regresi dilakukan untuk memprediksi atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel terikat dan variabel bebas (Gujarati, 2013).

Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Pada analisis data panel, meliputi dua jenis data yang digunakan dalam ekonometrika yaitu *unbalanced panel* serta *balanced panel*. *Balanced panel* sendiri adalah data yang menunjukkan banyaknya observasi yang sama pada masing-masing objek atau variabel yang digunakan. Sedangkan *unbalanced panel* adalah data yang menunjukkan jumlah observasi yang berbeda pada masing-masing objek atau variabel yang digunakan (Gujarati, 2013). Pada penelitian ini digunakan jenis data *balanced panel* dengan periode tahun 2014-2018 pada 12 kabupaten/kota di Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur, sehingga jumlah observasi yang digunakan sebanyak 60. Model dalam regresi data panel terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Common Effect Model (CEM)*

Common Effect Model atau yang sering disebut dengan *Pooled Least Square (PLS)* metode paling sederhana yang mempunyai intersep dan *slope* secara konstan. Artinya, pada estimasi model terdapat asumsi bahwa setiap unit individu mempunyai intersep dan *slope* yang sama, dengan kata lain regresi data panel yang dihasilkan berlaku untuk setiap individu (Juanda dan Junaidi, 2012). Pada model ini, tidak dibedakan varians antara *time series* maupun *cross section*. Hal ini dikarenakan *intercept* yang dimiliki bersifat tetap bukan acak. Model *common effect* memiliki bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.7)$$

dimana $i = 1, 2, 3, \dots, n$ dan $t = 1, 2, 3, \dots, t$. N adalah jumlah unit *cross section* sedangkan t merupakan jumlah periode dalam *time series*. Kemudian, apabila persamaan pada (3.6) ditransformasikan menjadi model *common effect* (3.7) maka akan menjadi:

$$PE_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 RDDF_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.8)$$

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Juanda dan Junaidi (2012) menjelaskan, pada metode *Fix Effect Model (FEM)*, intersep dibedakan antar individu karena setiap individu memiliki ciri-ciri masing-masing. Perbedaan dari setiap intersep dapat menggunakan peubah dummy, sehingga metode ini dikenal dengan model *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. Persamaan dalam model ini sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \dots + \alpha_n D_n + \alpha_n r_{it} + \mu_{it} \quad (3.9)$$

Kemudian, apabila persamaan pada (3.6) ditransformasikan kedalam model *fixed effect*, maka akan menjadi sebagai berikut ini:

$$PE_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_4 RDDF_{it} + \alpha_5 BM_{it} + \alpha_6 TPAK_{it} + \alpha_7 r_{it} + \mu_{it} \quad (3.10)$$

c. *Random Effect Model (REM)*

Random Effect Model merupakan model yang digunakan untuk mengestimasi data panel, dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu maupun individu (Widarjono, 2013). Asumsi yang terdapat pada metode ini adalah setiap perusahaan mempunyai perbedaan intersep. Model ini sangat berguna ketika individual dari perusahaan yang dijadikan penelitian diambil sebagai sampel yang dipilih secara random dan menjadi wakil dari populasi. Persamaan pada model *random effect* dituliskan sebagai berikut ini:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \beta_n r_{it} + \mu_{it} \quad (3.11)$$

apabila persamaan pada (3.6) akan ditransformasikan kedalam model *random effect*, maka akan menjadi sebagai berikut ini:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 RDF_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + \beta_4 r_{it} + \mu_{it} \quad (3.12)$$

Dalam melakukan pengujian dari ketiga model dalam regresi data panel, maka dapat menggunakan beberapa tahap uji yang menentukan hasil model terbaik meliputi Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier (LM)*.

a. Uji *Chow*

Uji *Chow* adalah salah satu bentuk atau tahap pengujian yang dilakukan untuk menentukan model yang terbaik diantara dua pilihan yakni model *common effect* dan *fixed effect* (Gujarati, 2013). Cara melihat manakah model yang terbaik maka dapat dilakukan melalui perbandingan hasil uji statistik. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa *cross section* cenderung memiliki perilaku yang berbeda. Pada tahap uji *chow* dapat dilakukan melalui hitungan F-statistik dengan rumus:

$$F - \text{statistik} = \frac{\frac{RSS_1 - RSS_2}{n}}{\frac{RSS_2}{nT - n - k}}$$

RSS_1 merupakan *Residual Sum Square* dari *common effect*; dan RSS_2 merupakan *Residual Sum Square* dari *fixed effect*; n adalah banyaknya *cross section*; T merupakan banyaknya *time series*; sedangkan k adalah jumlah variabel bebas. Hipotesis pada uji *chow* dinyatakan dengan $H_0 =$ model *panel square* dan $H_a =$ model

fixed effect. Apabila hasil F-statistik $>$ F-tabel, maka H_0 ditolak sehingga model yang terbaik adalah *fixed effect*. Begitu pula sebaliknya, ketika nilai F-statistik $<$ F-tabel, maka H_0 diterima dan menghasilkan kesimpulan bahwa model yang terbaik adalah *common effect*.

b. Uji Hausman

Uji *Hausman* dilakukan untuk menentukan model manakah yang terbaik diantara *fixed effect* dan *random effect*. Dalam menentukan model yang terbaik, maka dapat dilihat dari hasil nilai *Chi-Squared*. Hipotesis yang digunakan dalam uji *hausman* yaitu, H_0 = model *fixed effect* dan H_a = model *random effect*. Apabila hasil dari uji *hausman* $>$ *chi-squared* maka H_0 akan ditolak, sehingga model yang dapat digunakan adalah *random effect*. Begitu pula sebaliknya, ketika nilai dari uji *hausman* $<$ *chi-squared* maka model yang digunakan *fixed effect*.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *lagrange multiplier* adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan model mana yang terbaik diantara *common effect* dan *random effect*. Uji ini dilakukan ketika hasil uji sebelumnya menunjukkan penggunaan model *fixed effect*. Sehingga, untuk melihat hasil uji yang dihasilkan dapat dilihat melalui nilai kritis *chi-square*. Hipotesis yang digunakan pada uji *lagrange multiplier* yakni, H_0 = model *panel square* dan H_a = model *random effect*. Kemudian, apabila nilai dari hasil uji LM $>$ *chi-square*, maka H_0 akan ditolak sehingga model yang digunakan adalah *random effect*. Begitu pula sebaliknya, ketika hasil LM $<$ *chi-square* maka H_0 akan diterima, sehingga model yang digunakan adalah *common effect*.

3.4.2 Uji Statistik

a. Uji F atau Uji Simultan

Uji F dilakukan dengan tujuan melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian. Pada perhitungan uji F apabila nilai probabilitas yang dihasilkan $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, seluruh variabel independen secara bersamaan tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Begitu sebaliknya, apabila hasil yang dilakukan dari pengujian memiliki nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, seluruh variabel independen secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pada uji-F juga dilakukan pengujian nilai probabilitas F-statistik, yang dilihat dari hasil membandingkan nilai probabilitas f-statistik dengan nilai alfa. Apabila nilai $probabilitas F \leq \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, seluruh variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya, ketika nilai $probabilitas F > \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya yaitu seluruh variabel independen secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Gujarati, 2013).

b. Uji t atau Uji Parsial

Uji t dilakukan guna melihat atau mengetahui bagaimana pengaruh yang diberikan satu variabel bebas secara individu (parsial) terhadap variabel terikat. Secara simbolis dapat dijelaskan bagaimana variabel X_1 berpengaruh terhadap variabel Y , X_2 berpengaruh terhadap Y , dan begitu seterusnya. Perhitungan pada uji t dapat dilihat apabila ketika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a akan ditolak, sehingga secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Begitu pula sebaliknya, ketika nilai atau hasil dari $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, secara parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Pada perhitungan uji-t juga dilakukan pengujian nilai probabilitas t-statistik, yang dilihat dari hasil membandingkan nilai probabilitas t-statistik dengan nilai alfa. Apabila nilai $probabilitas t \leq \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, seluruh variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya, ketika nilai $probabilitas t > \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, seluruh variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Gujarati, 2013).

c. Uji *R-square* (R^2)

Uji ini digunakan untuk mengamati koefisien determinasi (R^2) dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil regresi yang telah diteliti antara variabel terikat dengan variabel bebasnya, atau R^2 digunakan untuk mengukur besarnya hubungan atau sumbangan variabel bebas pada variabel terikat. Nilai R^2 berkisar antara 0-1 (0%-100%), artinya ketepatan maupun kecocokan hasilnya sempurna jika R^2 memiliki nilai 1, dimana tidak terdapat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Jika R^2 semakin tinggi maka hasil regresinya semakin baik.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Pada pengujian ini meliputi beberapa tahapan yang terdiri atas uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji normalitas, dan uji multikolinearitas dengan tujuan agar model dan estimasi penelitian memperoleh hasil terbaik (Gujarati, 2004). Pengujian ini dilakukan untuk melihat estimasi asumsi dari dasar linear klasik *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE).

a. Uji Normalitas

Uji ini dapat dilakukan melalui uji Jarque-Berra LM dan normalitas antara variabel terikat dan variabel bebas harus dipenuhi dalam hubungannya dengan keabsahan dengan dilakukannya uji t dan uji F. Jika variabel pengganggu mempunyai distribusi normal, maka uji t dan uji F dapat dilakukan, jika asumsi normalitas tidak terpenuhi maka tidak dapat dilakukan uji t dan uji F, melainkan hanya dapat dilakukan dengan konteks asumsi asimtotik. Mengukur normalitas dapat dilakukan dengan perhitungan nilai *Chi-square* dan didasarkan pada *test of skeness* dan *kurtosis of residual* (Wardhono, 2004). Dasar pengambilan keputusan dari uji ini adalah:

1. Jika nilai *Chi-square* hitung $>$ nilai *Chi-square* tabel maka variabel pengganggu dari model tidak normal
2. Jika *Chi-square* hitung $<$ nilai *Chi-square* tabel maka variabel pengganggu dari model adalah normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas atau untuk mengetahui adanya hubungan liner antar variabel independen dalam model regresi. Adanya kemungkinan multikolinieritas yaitu, jika nilai F signifikan namun t-statistik tidak ada yang signifikan, nilai R^2 tinggi namun banyak t-statistik yang tidak signifikan atau jika koefisien korelasi antara dua variabel bebas $> 0,80$ maka kolinieritas berganda merupakan masalah serius (Erkanda, 2016).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu memiliki varian yang sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode Uji Park yaitu dengan meregresikan nilai residual dengan masing-masing variabel terikat. Kriteria pengujian antara lain:

- (1) H_0 = tidak ada gejala heterokedastisitas
- (2) H_a = terdapat gejala heterokedastisitas
- (3) H_0 diterima jika $t\text{-tabel} < t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, berarti tidak terdapat heterokedastisitas dan H_0 ditolak jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $t\text{-hitung} < -t\text{-tabel}$ yang artinya terdapat heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Permasalahan mengenai autokorelasi sering terjadi pada data *time series*. Pengujian autokorelasi pada data panel dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Nilai ujian Durbin-Watson digunakan untuk mengetahui keadaan korelasi positif atau negatif (Gujarati, 2013). Keputusan mengenai keberadaan autorelasi sebagai berikut:

- (1) Jika $d < d_l$, maka terdapat autokorelasi positif
- (2) Jika $d > (4 - d_l)$, maka terdapat autokorelasi negatif
- (3) Jika $d_u < d < (4 - d_l)$, maka tidak terdapat autokorelasi
- (4) Jika $d_l < d_u$ atau $(4 - d_u) < d < (4 - d_l)$, maka tidak dapat disimpulkan.

3.5 Definisi Operasional

Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada 2, yaitu variabel dependen (terikat) dan independen (bebas). Variabel dependen pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010. Sedangkan variabel independen pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara fokus hubungan yang terjadi pada penelitian. Variabel yang termasuk dalam variabel bebas yaitu Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), belanja modal, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini dijelaskan melalui uraian definisi operasional dari setiap variabel, yaitu sebagai berikut:

3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran total output barang dan jasa dari fungsi input unit-unit produksi yang digunakan pada suatu daerah dalam periode tertentu. Pada penelitian ini, variabel pertumbuhan ekonomi merupakan variabel dependen, dimana variabel diproksi menggunakan data log PDRB ADHK 2010 dari setiap kabupaten/kota di Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur. Satuan pada variabel ini adalah persen (%), dimana data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dengan kurun waktu 2014-2018.

3.5.2 Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD untuk pembiayaan pembangunan daerah (Putra dan Hidayat, 2016). Variabel Derajat Desentralisasi Fiskal pada penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan PAD terhadap TPD dari setiap kabupaten/kota di Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, hasil dari perhitungan tersebut dijadikan sebagai variabel independen pertama (X_1) dengan satuan persen (%) dengan kurun waktu 2014-2018. Data PAD dan TPD diperoleh dari DJPK Kemenkeu.

3.5.3 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk penyediaan aset tetap berwujud dengan nilai manfaat lebih dari satu periode. Pada penelitian ini, belanja modal merupakan variabel independen kedua (X_2), yang digambarkan melalui rasio belanja modal. Rasio belanja modal didapatkan dari perhitungan belanja modal dibagi dengan total belanja. Rasio belanja modal menggambarkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal (Anggraeny *et al.*, 2017). Data belanja modal yang digunakan berasal dari DJPK Kemenkeu, dimana data ini merupakan data dari seluruh kabupaten/kota di Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur selama periode 2014-2018 dengan satuan persen (%).

3.5.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tenaga kerja dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pada penelitian ini, variabel tenaga kerja diproksi dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap jumlah penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas (BPS Provinsi Jawa Timur, 2019). Variabel independen ketiga (X_3) digambarkan melalui data TPAK menurut kabupaten/kota di Koridor Utara Selatan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur selama periode 2014-2018 dengan satuan persen (%).

3.6 Limitasi Penelitian

Limitasi atau kelemahan dari penelitian ini antara lain:

1. Pada penelitian ini, peneliti tidak dapat menemukan teori yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah atau belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Tahun penelitian yang digunakan masih 5 tahun yaitu 2014-2018
3. Belum seluruh kabupaten/kota maupun koridor pembangunan di Jawa Timur masuk dalam penelitian, hanya Koridor Utara Selatan yang digunakan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai derajat desentralisasi fiskal, belanja modal, dan TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, khususnya di Koridor Utara Selatan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) kabupaten/kota di Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur rata-rata masih berada pada kategori kurang dengan persentase kurang dari 20%. Hal ini dikarenakan dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pemerintah daerah cenderung masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat.
2. Hasil perhitungan dari analisis regresi data panel dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Koridor Utara Selatan. Hal ini dikarenakan peningkatan PAD dapat meningkatkan aktivitas sektor-sektor terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - b. Belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Koridor Utara Selatan. Hal ini dikarenakan kurang tepatnya pengalokasian belanja modal serta investasi swasta yang masih mendominasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Koridor Utara Selatan. Hal ini dikarenakan kesempatan pekerjaan cenderung sejalan dengan meningkatnya angkatan kerja dengan pendidikan tamatan tertinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan serta dikaitkan dengan kesimpulan, maka saran perlu diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan langkah mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan, terutama bagi daerah-daerah yang DDF masih berada pada kategori kurang. Misalnya dengan pengoptimalan PAD tidak hanya melalui pajak atau retribusi daerah tapi juga bisa melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu dari laba atas penyertaan modal serta menarik investor asing melalui peran BUMD. Selain itu, cara lain dapat melalui pengembangan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan komoditi unggulan daerah.
2. Pemerintah daerah harus memperhatikan kembali alokasi belanja modal dalam anggaran daerah. Perencanaan penganggaran yang berkaitan dengan belanja modal harus berfokus pada tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor yang terhitung produktif. Selain itu, efektivitas belanja modal dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah dapat dialokasikan misalnya pada pembangunan fasilitas publik (jalan, jembatan) dan pemberian fasilitas untuk para usaha kecil menengah.
3. Upaya dalam meningkatkan angkatan kerja yang berkualitas pada pasar tenaga kerja, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan tidak hanya melalui pendidikan formal dapat juga melalui bidang pendidikan non-formal (pelatihan).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aksari, S. 2017. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo*. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 6(1): 54-62.
- Andiatma, M. S. 2014. *Analisis Potensi Ekonomi Sektoral Koridor Utara Selatan Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2009*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(2): 151-178.
- Anggraeny, S. N., Kudhori, A., dan Lestariningsih, T. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Madiun Tahun 2011-2015)*. Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi), 1(1): 28-35.
- Arifin, Z. 2009. *Analisis Perbandingan Perekonomian pada Empat Koridor di Propinsi Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 7(1): 77-84.
- Azwar. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azwar. 2016. *Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia*. Kemenkeu Journal: Kajian Ekonomi Keuangan Vol. 20 No. 2
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. 2018. *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018*. Blitar: BPS Kabupaten Blitar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2018. *Kabupaten Gresik Dalam Angka 2018*. Gresik: BPS Kabupaten Gresik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 2018. *Kabupaten Malang Dalam Angka 2018*. Malang: BPS Kabupaten Malang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2018. *Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2018*. Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. 2018. *Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2018*. Pasuruan: BPS Kabupaten Pasuruan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. 2018. *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2018*. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo.
- Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2018. *Kota Batu Dalam Angka 2018*. Batu: BPS Kota Batu.
- Badan Pusat Statistik Kota Blitar. 2018. *Kota Blitar Dalam Angka 2018*. Blitar: BPS Kota Blitar.

- Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2018. Kota Malang Dalam Angka 2018. Malang: BPS Kota Malang.
- Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. 2018. Kota Mojokerto Dalam Angka 2018. Mojokerto: BPS Kota Mojokerto.
- Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. 2018. Kota Pasuruan Dalam Angka 2018. Pasuruan: BPS Kota Pasuruan.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. 2018. Kota Surabaya Dalam Angka 2018. Surabaya: BPS Kota Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2018. Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2019. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2019. Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014-2017. Jakarta: BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2015-2018. Jakarta: BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2014-2018. Jakarta: BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2017-2018 Buku 1 (Sumatera, Jawa). Jakarta: BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016-2019. Jakarta: BPS Indonesia.
- Bappenas. 2008. Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota. Jakarta: Pusat Perencanaan Tenaga Kerja
- Bappenas. 2019. Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan II Tahun 2019. Bappenas: Berita dan Siaran Pers.
- Buana, A. L., Saragih, H. J. R., dan Aritonang, S. 2019. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011-2015*. *Ekonomi Pertahanan*, 4(2).
- Budiardjo, M. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Cahyono, B. D. 2014. *Identifikasi Derajat Kompetisi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 22(1): 47-54.
- Chalid, P. 2010. *Teori Pertumbuhan*. Modul. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Christia, A. M., dan Ispriyarso, B. 2019. *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*. LAW REFORM, 15(1): 149-163.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2020. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. [diakses pada 22 Oktober 2020].
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. Ringkasan APBD 2018. Jakarta: Ditjen Perimbangan Keuangan.
- Erkanda, M. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fadly, F. 2016. *Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah?*. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 16(2): 62-73.
- Fajri, A. 2016. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera*. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 5(1): 29-35.
- Febriantoko, J. 2017. *Analisis Kemampuan Keuangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera*. SNTIBD, 2(1): 51-57.
- Gujarati, D. 2004. *Basic Econometrics 4th Edition*. Singapore: McGraw-Hill Inc.
- Gujarati, D. 2013. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga
- Hanafi, D. I., dan Mugroho, T. L. 2009. *Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasi dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Hidayat, M. N. S. 2016. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa Timur (Studi Kasus 38 Kab/Kota di Jawa Timur)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 4(1).
- Idris, A. 2016. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Idris, A. 2016. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jandi, I. 2014. *Kajian atau Analisis Rasio Anggaran Pendapatan Daerah pada APBD 2014 di 34 Provinsi dalam Wilayah NKRI*. <https://www.kompasiana.com/ibnujandi/54f715ffa3331154548b4581/kajian-atau-analisis-rasio-anggaran-pendapatan-daerah-pada-apbd-2014-di-34-provinsi-dalam-wilayah-nkri>. [Diakses pada 17 Maret 2020].

- Juanda, B., dan Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu: Teori & Aplikasi*. IPB Press: Bogor.
- Khotimah, K. 2019. Pengaruh *Brain Drain*, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Kresnandra, A. A. N. A. 2016. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Dana Perimbangan dan Investasi Swasta sebagai Variabel Pemoderasi*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3(2).
- Mahfud, M. 1999. *Pergulatan Hukum dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mankiw, N. G. 2000. *Teori Makroekonomi Edisi Keempat*. Terjemahan: Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga.
- Mantra, I. B. 2003. *Demografi Umum Edisi Kedua*. Yogyakarta: Pustaka.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muluk, M. R. K. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. ITSPress bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan & Dokumentasi, FIA, Unibraw.
- Musaidah, D. A., Riani, I. A. P., dan Marlissa, E. R. 2018. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Kapasitas Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah Daerah di Provinsi Papua*. *KEUDA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 3(1).
- Nurcholish, H. 2005. *Teori Dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Tra-sindo.
- Oates, W. E. 1993. *Fiscal Decentralization and Economic Development*. *National Tax Journal*, 46(2): 237-243.
- Prakarsa, F. D., dan Noor, I. 2013. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Puspitasari, I., Saleh, M., & Yunitasari, D. 2018. *Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Periode Tahun 2011-2015*. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1): 11-15. ISSN 2685-3523.

- Putra, R., dan Hidayat, S. 2016. *Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 3(4): 243-256.
- Radianto, E. 1997. *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II, Suatu Studi di Maluku*. Prisma, 3(16): 86-99.
- Rafiq, M. 2016. *Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Masyarakat, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2001:T1-2010:T4*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Rahmawati, Y. O. 2019. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 1995-2017*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb, 7(2).
- Reksohadiprojo, S. 2000. *Ekonomika Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Rofii, A. M. 2017. *Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur*. JEB17: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(01).
- Rori, C. F., Luntungan. A. Y., dan Niode. A. O. 2016. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013*. EFISIENSI, 16(2).
- Rosadi, D. 2010. *Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu Terapan Dengan R Aplikasi Untuk Bisangkonomi, Bisnis, dan Keuangan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Rusdiana, A. 2017. *Analisis Kemandirian Fiskal dalam Era Otonomi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Safitri, W., Yunitasari, D., dan Komariyah, S. 2020. *Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomian Daerah (Studi Kasus Tujuh Provinsi Hasil Pemekaran Wilayah Di Indonesia)*. E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 7(1): 54-58. ISSN 2685-3523.
- Saputra, B., dan Mahmudi, M. 2012. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 16(2).
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sasana, H. 2006. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP), 3(2): 146-170.
- Sianturi, R., dan Wiwoho, B. 2018. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 3(1): 573-588.
- Sianturi, Y. S., dan Miyasto, M. 2011. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara)*. *Doctoral Dissertation*. Universitas Diponegoro.
- Siddik, M. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta.
- Simanjuntak, R. 2002. *Enambelas Bulan Perjalanan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. dalam 80 Tahun Mohamad Sadli: Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru. Jakarta: Kompas.
- Sistiana, M., dan Makmur, M. H. 2014. *Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten/kota*. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 12(4): 277-286.
- Sondakh, J. 2013. *Telaah Teoritis Tentang Sistem Desentralisasi Dalam Pengaturan Investasi Di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat, 1(1): 1-16.
- Subri, M. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sukirno, S. 2011. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, S. 2012. *Ekonomi Makro Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumarsono, S. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunardi, Y. P., Rumat. V.A., dan Siwu. H. F. Dj. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. EFISIENSI, 17(01).
- Supranto. 2009. *Statistik Teori dan Aplikasi Edisi Ke-7*. Jakarta: Erlangga
- Suwandi. 2015. *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syahputra, R. 2017. *Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang*. Jurnal Samudra Ekonomika, 1(1): 12-21.

- Syukri, A. U. 2019. *Anomali Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah; Upaya Mengakselerasi Penerimaan Daerah*. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1): 36-53.
- Tarigan, R. 2004. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga 1*. Terjemahan: Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., dan Smith, S. C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Wardhono, A. 2004. *Mengenal Ekonometrika*. Edisi Pertama. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Widarjono, A. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasi*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wilantari, R. N. 2013. *Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah*. *Media Trend*, 8(1): 1-15.
- Wulandari, P. A., dan Iryanie, E. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yang, Z. 2016. *Tax Reform, Fiscal Decentralization, and Regional Economic Growth: New Evidence from China*. *Economic Modelling*, 59: 520-528.
- Yushkov, A. 2015. *Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth: Theory, Empirics, and The Russian Experience*. *Russian Journal of Economics*, 1(4): 404-418.

Lampiran

A. Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	DDF (%)	Belanja Modal (%)	TPAK (%)
Kabupaten Blitar	2014	4,30	9,80	21,37	69,12
Kabupaten Blitar	2015	4,32	10,21	24,53	67,57
Kabupaten Blitar	2016	4,34	10,00	29,24	68,92
Kabupaten Blitar	2017	4,36	13,99	25,25	71,05
Kabupaten Blitar	2018	4,39	10,73	18,55	70,61
Kabupaten Malang	2014	4,72	13,44	17,51	66,04
Kabupaten Malang	2015	4,74	13,31	20,18	66,28
Kabupaten Malang	2016	4,77	14,62	19,30	65,17
Kabupaten Malang	2017	4,79	19,87	20,47	66,28
Kabupaten Malang	2018	4,81	15,30	19,69	69,70
Kabupaten Pasuruan	2014	4,90	19,09	16,33	70,91
Kabupaten Pasuruan	2015	4,93	18,99	19,01	67,70
Kabupaten Pasuruan	2016	4,95	17,04	26,53	72,46
Kabupaten Pasuruan	2017	4,97	24,80	15,87	66,61
Kabupaten Pasuruan	2018	5,00	19,27	14,26	69,59
Kabupaten Sidoarjo	2014	5,03	34,07	17,76	67,94
Kabupaten Sidoarjo	2015	5,05	35,62	25,56	67,49
Kabupaten Sidoarjo	2016	5,07	36,40	22,18	67,87
Kabupaten Sidoarjo	2017	5,10	41,32	15,08	64,54
Kabupaten Sidoarjo	2018	5,12	38,90	19,35	64,53
Kabupaten Mojokerto	2014	4,65	18,89	21,32	67,80
Kabupaten Mojokerto	2015	4,67	19,59	22,57	69,56
Kabupaten Mojokerto	2016	4,69	20,62	19,57	68,50
Kabupaten Mojokerto	2017	4,72	21,43	24,79	73,23
Kabupaten Mojokerto	2018	4,74	22,44	23,33	71,92
Kabupaten Gresik	2014	4,88	31,75	24,11	63,66
Kabupaten Gresik	2015	4,91	32,83	23,10	64,69
Kabupaten Gresik	2016	4,93	28,37	16,20	64,82
Kabupaten Gresik	2017	4,96	31,78	15,98	68,04
Kabupaten Gresik	2018	4,98	33,28	13,80	67,29
Kota Blitar	2014	3,56	14,61	19,17	66,46
Kota Blitar	2015	3,59	15,75	21,52	71,46
Kota Blitar	2016	3,61	15,57	23,71	73,58
Kota Blitar	2017	3,63	22,89	22,31	71,90
Kota Blitar	2018	3,66	18,23	19,73	72,21
Kota Malang	2014	4,60	21,11	19,87	63,66
Kota Malang	2015	4,62	23,23	18,72	60,56
Kota Malang	2016	4,65	27,42	11,33	60,16
Kota Malang	2017	4,67	29,83	18,77	64,77

Kabupaten/Kota	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	DDF (%)	Belanja Modal (%)	TPAK (%)
Kota Malang	2018	4,69	27,30	18,24	65,94
Kota Pasuruan	2014	3,66	14,35	17,10	67,78
Kota Pasuruan	2015	3,68	15,53	21,49	67,24
Kota Pasuruan	2016	3,71	18,73	21,96	64,62
Kota Pasuruan	2017	3,73	17,56	26,85	67,14
Kota Pasuruan	2018	3,75	16,94	22,76	66,33
Kota Mojokerto	2014	3,58	15,27	22,40	68,07
Kota Mojokerto	2015	3,60	18,01	19,24	69,87
Kota Mojokerto	2016	3,63	18,90	32,15	68,80
Kota Mojokerto	2017	3,65	22,79	16,39	68,65
Kota Mojokerto	2018	3,67	20,56	14,78	69,19
Kota Surabaya	2014	5,49	54,64	24,61	66,56
Kota Surabaya	2015	5,51	60,97	27,50	66,10
Kota Surabaya	2016	5,54	59,92	25,02	66,29
Kota Surabaya	2017	5,56	64,25	31,82	66,36
Kota Surabaya	2018	5,59	60,83	29,72	66,98
Kota Batu	2014	3,93	11,44	21,59	70,38
Kota Batu	2015	3,96	14,36	34,39	68,60
Kota Batu	2016	3,99	13,63	21,27	68,93
Kota Batu	2017	4,02	17,59	18,30	73,35
Kota Batu	2018	4,04	16,51	14,72	70,52

B. Pengujian Analisis Regresi Data Panel

B1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1407.440515	(11,45)	0.0000
Cross-section Chi-square	350.619798	11	0.0000

B2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.820614	3	0.0207

C. Model Terbaik

Dependent Variable: PE
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/25/20 Time: 19:03
 Sample: 2014 2018
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.875454	0.326211	27.20774	0.0000
DDF	2.105564	0.331323	6.355009	0.0000
BM	-0.277085	0.204944	-1.352001	0.1831
TPAK	1.492395	0.469248	3.180398	0.0027

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.818580	Mean dependent var	10.33733
Adjusted R-squared	0.808138	S.D. dependent var	1.407638
S.E. of regression	0.060741	Akaike info criterion	-2.552071
Sum squared resid	0.166027	Schwarz criterion	-2.028485
Log likelihood	91.56214	Hannan-Quinn criter.	-2.347268
F-statistic	2260.072	Durbin-Watson stat	1.827822
Prob(F-statistic)	0.000000		

D. Hasil Estimasi *Individual Effect* pada Model *Fixed Effect*

CROSSID	Effect
1	-0.078077
2	0.834238
3	1.119629
4	1.085867
5	0.513335
6	0.890715
7	-1.930462
8	0.388827
9	-1.626253
10	-1.900401
11	1.691999
12	-0.989418

E. Uji Asumsi Klasik

E1. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 11/25/20 Time: 19:07

Sample: 2014 2018

Periods included: 5

Cross-sections included: 12

Total panel (balanced) observations: 60

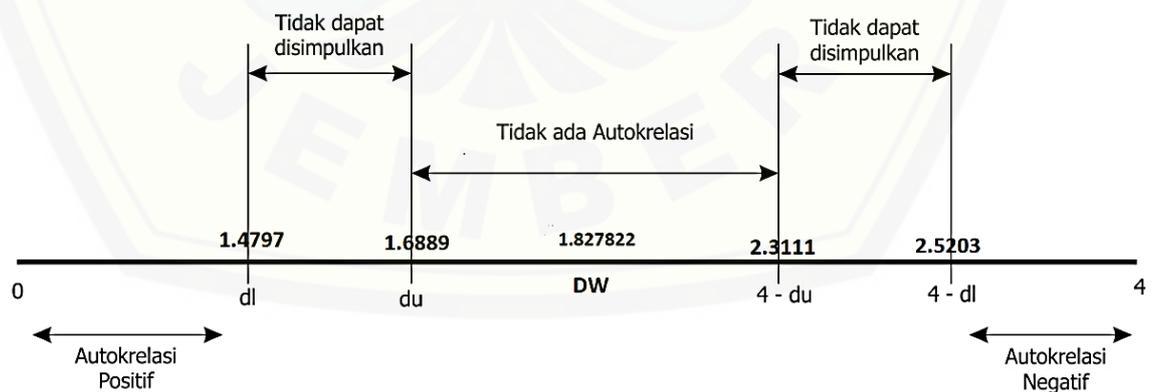
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.146046	0.173454	-0.841991	0.4042
DDF	0.034231	0.176172	0.194301	0.8468
BM	-0.176419	0.108974	-1.618912	0.1125
TPAK	0.321017	0.249510	1.286589	0.2048

Effects Specification

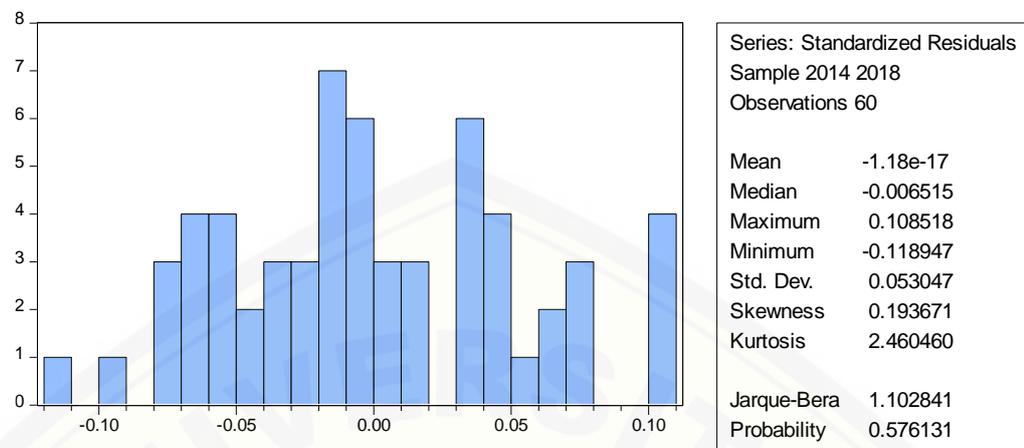
Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.168130	Mean dependent var	0.042739
Adjusted R-squared	-0.090674	S.D. dependent var	0.030926
S.E. of regression	0.032297	Akaike info criterion	-3.815336
Sum squared resid	0.046941	Schwarz criterion	-3.291750
Log likelihood	129.4601	Hannan-Quinn criter.	-3.610533
F-statistic	0.649643	Durbin-Watson stat	2.284074
Prob(F-statistic)	0.808530		

E2. Uji Autokorelasi



E3. Uji Normalitas



E4. Uji Multikolinieritas

	DDF	BM	TPAK
DDF	1.000000	0.213509	-0.350667
BM	0.213509	1.000000	0.164309
TPAK	-0.350667	0.164309	1.000000